Tahun 2022

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Pasteur No. 25 Bandung

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
Jl. Pasteur No. 25 Telp. (022) 421800, 4218572 Fax (022) 4236721 BANDUNG 40171
Website: diskes.jabarprov.go.id, email: tikdiskesjabar@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA BARAT

Nomor : 13008 / KS.01/PP.Diskes
TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/2307/PP Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
BAB I Pendahuluan
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V Penutup

KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 Agustus 2021

an. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN

dr. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 196212031988032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah, karunia dan bimbingan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dapat diselesaikan. Renja tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pembangunan kesehatan di Jawa Barat dengan sumber pembiayaan bersumber dari Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (APBD Provinsi), Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) dan dana lain berupa Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Renja Dinas Kesehatan tahun 2022, merupakan pedoman atau acuan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan bagi pengelola program kesehatan yang berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta memperhatikan hasil Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat memahami dan menjadikan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini sebagai acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan amanah Pembangunan Bidang Kesehatan di Jawa Barat, dan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga dalam menyusun dan menyelesaikan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 03 Agustus 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621203 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I PENDAHULUAN ……..……..…..……1

1.1 Latar Belakang…….……1

1.2 Landasan Hukum…….……...2

1.3 Maksud dan Tujuan……...…7

1.4 Sistematika Penulisan……...…...7

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020……..……9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra…….9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan…….…89

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi……..……..119

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..……121

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat…….……159

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN…….……167

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……..….167

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja…….……...…170

3.3 Program dan Kegiatan……..…175

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …….……..184

V. **PENUTUP**……..……..…428

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	10
2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	89
2.3	Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III	96
2.4	Review terhadap rancangan RKPD tahun 2022 Provinsi Jawa Barat	122
2.5	Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline	159
2.6	Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline	160
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan	172
4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 – 2023	184

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu, dan memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah wajib membuat dokumen rencana kerja, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat, tidak terkecuali Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh dampak pandemic Covid-19 yang masih terjadi di Provinsi Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Hal ini tentunya masih akan berpengaruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2022. Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana membawa situasi pandemi Covid-19 ini ke dalam situasi yang dapat diperlakukan sebagai situasi endemis. Hal ini akan berdampak terhadap kebijakan di bidang kesehatan dimana persiapan-persiapan untuk menghadapi adaptasi keboasaan baru pasca pandemic harus sudah mulai dilakukan dengan porsi yang mugkin akan lebih besar diabndingkan waktu-waktu sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan
e. penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang berpedoman kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
2. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peratiuran Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting;
25. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 581);
40. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
41. Keputusan Menteri Keuangan No 6/KM 7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 28 Seri E);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Nomor 12 Seri E);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembambangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
50. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
52. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat
54. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Surat Ketarangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

56. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.1751-Dinkes/2014 tentang Penetapan Fasiilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi pada Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi.
57. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
58. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13912/KS.01/PP tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai acuan/pedoman bagi :

a. Bidang/Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022.
b. Balai/Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2020. Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melihat: (1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebih target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sampai dengan 2020 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT				100%	11,408,150,000			979,780,750	965,088,750	98.50 %
	Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi mengenai informasi teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kab/Kota) 2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota) 3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab;	100%	11,408,150,000	70 %	56,0 %	14,745,000	12,378,395	96.0 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab; 5) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P3 Kab. Sumedang; 6) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lap) 7) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Bimbingan Teknis Klinis K2; (1 Kab) 8) Jumlah Dokumen MoU Rujukan kab Ciamis; 9) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Maklumat Pelayanan di PKM dan RS di kab ciamis; 10) Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop pengenalan dan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			implementasi Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab. Ciamis; (30 Org) 11) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian Maternal Dan Perinatal kab ciamis; 12) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilittaif kab ciamis; 13) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab. Pengembangan (kab ciamis); 14) Jumlah Dokumen Laporan hasil Kesepakatan Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi dan Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir di Kab Ciamis; 15) Jumlah Laporan hasil							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Assesment di Fasyankes Kab. Ciamis; 16) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes Kab. ciamis;							
	Peningkatan Gizi Masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95%	1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat Koordinasi teknis program gizi; 2) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD ibu hamil; 3) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD rematri; 4) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi Penilaian Pertumbuhan; 5) Jumlah Laporan dan RTL Rapat koordinasi teknis Program Gizi; 6) Dokumen hasil dan RTL	100%	8,451,497,700	70 %	59,0 %	241,941,350	236,649,900	97,81 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pekan ASI Sedunia; 7) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska pelatihan/ Orientasi PAG di Puskesmas; 8) Jumlah Laporan dan RTL Pendampingan cakupan indikator; 9) Jumlah Laporan dan RTL Bintek Peningkatan Gizi Masyarakat; 10) Jumlah Laporan dan RTLmanajment program gizi; 11) Laporan Hasil konsultasi pusat; 12) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan penyusunan hasil BPB; 13) Jumlah Laporan dan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RTL Evaluasi kegiatan program gizi; 14) Jumlah Laporan dan RTL pemenuhan undangan dalam provinsi							
	Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Minum yang Berkualitas	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan terpadu Kesling dan STBM; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Workshop Kab/Kota Sehat; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas STBM; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Kesling Terpadu	100%	3,648,220,000	80 %	80,29 %	140,333,500	137,519,500	97,99 %
	Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama Haji Tahun	Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil kesepakatan pertemuan Koord Kesling	95%	2,239,050,000	80 %	82,49 %	24,021,000	23,192,000	96,55 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2019		RS; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil s pemicuan STBM di DAS Citarum, 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laboratorium Kesehatan; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatann Rakor DAS Citarum; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev TTU/TPM/RS; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Pengawasan HS Embarkasi; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas HS TPM Transit							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jemaah Haji dan; 8 Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian asrama haji.							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	1) Jumlah Dokumen hasil Kesepakatan Pembentukan SK Tim GP2SP Puskesmas di 20 Kab/Kota; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Upaya Kesehatan Kerja sektor informal dlm mendukung capaian kinerja Kesehatan kerja Puskesmas di 20 Kab/Kota; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Puskesmas di 20 Kab/Kota	75 %	770,851,000	60 %	79,91 %	5,470,000	5,470,000	100 %
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan PHBS Rumah	85,2 %	10,324,713,126	4	4	366,315,800	365,742,400	99,84 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Masyarakat di Bidang Kesehatan	Tangga; 2) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Model PHBS Tempat Kerja/Sekolah/ Tempat Tempat Umum; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Promotif Preventif bersama Mitra Kesehatan (Toma/ Komunitas/ Ormas/ DU); 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Monev PKRS; 5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM Kesehatan di berbagai media dan event; 6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Distribusi Media Cetak; 7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; 8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Hasil Workshop/Kursus/Seminar.							
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Aktif; 2) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan Advokasi kepada tokoh masyarakat, komunitas kesehatan, ormas dan dunia usaha; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif;	4	6,521,774,907	4	4	53,405,000	51,594,000	96,61 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas di Kab Subang; 5) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SBH. 6) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembentukan Poskestren Model; 7) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Review Pengembangan UKBM							
	Peningkatan Program Kesehatan Keluarga	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 88%	1) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Kegiatan Upaya Kesehatan Keluarga;		14,251,300,000	70 %	56,0 %	133,549,100	132,542,100	99,25 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Implementasi Tata Klinis Kesehatan Keluarga; 3) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Sekolah Sehat; 4) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Pemberdayaan Lansia; 5) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi; 6) Laporan hasil dan RTLPertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi; 7) Laporan hasil dan RTL Orientasi Pelayanan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan Maternal dan Neonatal; 8) Laporan hasil dan RTL Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin; 9) Laporan hasil Dukungan Manajemen Program Kesehatan Keluarga; 10) Laporan hasil dan RTL Pembinaan dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Dalam Provinsi; 11) Laporan hasil dan RTL Konsultasi dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Luar Provinsi							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olah Raga	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1) Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji di 27 Kab Kota	75 %	387,320,000	60 %	0	10,585,000	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah di 15 Kab Kota							
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	1). Jumlah Dokumen Laporan hasil Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB yang diobati 90 % 2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab /Kota berbasis online dengan aplikasi SITT 3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan Peningkatan Pencegahan dan pengendalian TB pada Anak 4) Jumlah dokumen	91 %	6,416,524,680	89 %	73,16 %	201,643,400	192,390,677	95,41 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Laporan Logistik Program P2TB 5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis sesuai permenkes nomor 67 tahun 2016 6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dapat didiskusiakan dengan Kab/Kota 7) Jumlah dokumen Laporan Laporan kegiatan Refreshing monev laboratorium untuk LRI di 27 kab/Kota 8) Jumlah dokumen kontrak tenaga pendamping Tuberkulosis terpenuhi						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM ditingkat provinsi 10) Jumlah dokumen pengembangan Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota 11) Jumlah Dokumen 16 RS yang tercantum di KMK 350 tahun 2017 melaksanakan layanan TB RO017 melaksanakan layanan TB RO							
	Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS	Persentase Pasien HIV Yang Diobati	1.Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV 2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik	50 %	6,089,837,250	45 %	42 %	165,509,555	160,509,555	97,21 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			P2 HIV dapat Terpenuhi 3. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota) 4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan, Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia 5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS 6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 k/k 7. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV 8. Jumlah Dokumen Hasil							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi Manjemen Program sesuai pedoman 9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik, 10. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Pendamping							
	Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mencapai UCI >90%	1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar; 3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS tingkat Provinsi; 4) Jumlah kab/kota yang	92 %	3,574,140,000	90,5 %	44,8 %	107,067,200	106,447,200	99,42 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL dalam rangka pencapaian UCI; 5) Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program yang diberikan honor dari APBD Provinsi selama 1 tahun; 7) Jumlah Dokumen Honor diberikan kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI; 8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunsasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2020 dan tersosialisasi up date Program 2021; 11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12) Jumlah Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi							
	Pengendalian penyakit menular ISPA	Persentase Kab/Kota 50% Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat 2. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran dalam penguatan jejaring kerjasama profesi (lintas sektor) 3. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing-masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA 4. Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP	65 %	1,282,840,000	60,0 %	44,44 %	29,183,789	27,089,500	92,82 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5. Diperolehnya dokumen pemantauan Sentinel ILI							
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	1) Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP 2) Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus 3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B 4) Jumlah Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Subdit HPISP 5) Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis di 13 kab/kota	100 %	1,739,953,500	80 %	96 %	73,782,206	72,646,200	98,46 %
	Pencegahan dan pengendalian DBD	Persentase Kab/Kota yang Mencapai IR DBD <49/100.000	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes	96 %	1,944,081,183	90 %	55,55 %	19,196,179	18,874,300	98,32 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penduduk	terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen SK Tim Pokjanal DBD masing-masing sektor 3. Jumlah Draft Surat Edaran Gubernur dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD 4. Jumlah Dokumen Pedoman SOP tatalaksana kasus di setiap Faskes 5. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 6. Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pembentukan SK Satu Rumah Satu Jumantik di Kab/Kota						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian penyakit malaria	Persentase Kab/Kota Sudah Eliminasi Malaria	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria 3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus 4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus 5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu	100 %	1,348,868,328	93 %	93 %	58,357,874	57,002,500	97,68 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian penyakit kusta	Proporsi Cacat Kusta Tingkat II	1) Jumlah Dokumen Kesepakatan Dokter Spesialis Kusta dalam Penanganan dan Pengobatan Kusta; 2) Jumlah Kab/Kota didapatkan data yang Valid dan Akurat; 3) Jumlah Dokumen Arahan dan Rekomendasi tentang Pengedalan Peyakit Kusta; 4) Jumlah Kab/Kota mendapatkan Sosialisasi Kusta untuk Perguruan tinggi di Jawa Barat	9 %	4,575,000,000	< 10 %	6 %	111,972,920	109,301,500	97,61 %
	Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	'1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis dan Reduksi Cacingan 2) Jumlah dokumen	73 %	2,052,964,000	45 %	27,27 %	74,949,841	74,176,200	98,97 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur 3) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota 4) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian cacingan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting 5) Jumlah Tenaga pendamping Filariasis dan cacingan dapat terpenuhi sebanyak 2 orang 6) Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Cacingan dapat terupdate							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			segera							
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Rabies	1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar 2. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di indonesia dan di jawa barat 3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zooinosis di Daerah Perbatasan Provinsi 4. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Daerah Perbatasan 5. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evbaluasi P2 Zoonosis	100 %	2,530,408,242	88 %	88 %	40,387,923	36,710,750	90,90 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan SI P2PTM Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program P2PTM; 4) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Kanker dan Gangguan Darah Bagi	70 %	12,350,664,000	55 %	51,69 %	124,220,400	122,734,400	98,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 5) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Sektor dan Petugas Kesehatan Puskemas; 6) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Diabetes Melitus Sedunia; 7) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Thalassemia Sedunia; 8) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Sedunia; 9) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM; 10) Jumlah Laporan Hasil							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bimbingan Teknis Program P2PJPD; 11) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PKKD; 12) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Program P2DMGM; 13) Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2PTM; 14) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PTM; 15) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Program GIF; 16) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 17) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Puskesmas; 18) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Tingkat Provinsi Jawa Barat; 19) Jumlah Laporan Peringatan Hari Disabilitas Internasional; 20) Jumlah Laporan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia; 21) Jumlah Pendamping Teknis GIF; 22) Jumlah Laporan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bimbingan Teknis Program GIF; 23) Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Program GIF							
	Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa	Persentasi penduduk mengalami gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Keswa; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di			100 %	74 %	69,961,200	61,870,654	88,44 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Provinsi dan Kab/Kota; 4) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia; 5) Tenaga Teknis Pendamping Program Kesehatan Jiwa; 6) Dokumen Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pasung Pada Gangguan Jiwa; 7) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program IPWL di Kab/Kota; 8) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PTRM; 9) Dokumen Laporan Konsultasi Teknis Program Kesehatan Jiwa;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10) Dokumen Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa; 11) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Upaya Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Anak Sekolah bagi Guru di 27 Kab/Kota; 12) Dokumen Laporan Kegiatan Implementasi Skrining Kesehatan Jiwa Pada Anak Sekolah dengan Kuisioner SDQ di 14 Kab/Kota							
PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA & KESEHATAN AKIBAT KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI										
	Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra	Persentase kegiatan Rapid Health Assesment	1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat;	100 %	5,008,527,100	100 %	100 %	137,098,020	128,681,200	93,86 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di Jawa Barat; 5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji; 6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan kegiatan program bencana bidang kesehatan;						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7) Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; 8) Jumlah tenaga teknis program yang honorariumnya terbayar							
	Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB	Persentase masyarakat yg dilayani di lokasi bencana	1) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans dan SKD KLB; 2) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Difteri dan KLB lainnya; 3) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa; 4) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans Difteri; 5) Jumlah Petugas Surveilans Kab/Kota	100 %	4,948,100,000	100 %	100 %	287,751,200	269,527,200	93,67 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/ Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat; 6) Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes; 7) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kasus AFP/Campak dan Rubela; 8) Petugas Surveilans Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun; 9) Jumlah petugas Kesehatan Kab kota dan Rumah Sakit mengikuti pertemuan peningkatan sistem pelaporan surveilans puskesmas dan rumah							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sakit; 10) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota mengikuti pertemuan riview penanggulangan KLB tingkat provinsi; 11) Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium; 12) Petugas Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert							
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								13,452,628,600	10,623,522,041	78,97 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	1) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat melaksanakan evaluasi akreditasi FKTP dan mempersiapkan re-	100 %	6,148,538,240	100 %	94,92 %	144,510,100	136,831,100	94,69 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			akreditasi puskesmas; 2) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi Klinik Pratama kab/ kota dan provinsi mendapatkan informasi standar akreditasi Klinik Pratama; 3) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP; 4) Jumlah Petugas Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota dan LP/ LS provinsi mendapat sosialisasi tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi; 5) Jumlah Petugas							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang keselamatan pasien; 6) Jumlah Peserta Kab/ Kota yang membawahi akreditasi, Mengikuti Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS provinsi dan mendapat sosialisasi tata kelola rekam medis di FKTP; 7) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP							
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	1) Jumlah Pengelola Lab Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang revisi Standar Akreditasi Laboratorium	60 %	2,632,784,760	30 %	85,20 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan; 2) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS; 3) Jumlah Pengelola Laboratorium Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang program K3 di Labkes							
	Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Kab/Kota Puskesmas sesuai standar	1) Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penilaian FKTP Berprestasi Tk Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Jumlah Pengelola Program yankes primer dari 27 Kab/Kota dan provinsi yang mampu bersinergi	100 %	19,694,848,080	86 %	82 %	301,780,700	130,880,548	43,37 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dalam pelaksanaan kegiatan program yankes; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monev PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Tahun 2020; 4) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga; 5) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Penguatan quick wins Pelayanan Darah di Provinsi Tahun 2020; 6) Jumlah Dokumen laporan sinergitas program pelayanan kesehatan primer;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer; 8) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik							
	Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	1) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional; 2) Jumlah Dokumen validasi dan sinkronisasi data program pelayanan kesehatan tradisonal; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di	96 %	3,633,083,170	72 %	75,23 %	213,404,000	62,742,200	29,40 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			FKTP dan FKTL; 4) Jumlah dokumen konsolidasi Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional (SP3T) Pelayanan Kesehatan Tradisional							
	Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait layad rawat	1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota	100 %	277,433,500,000	48,15 %	100,0 %	12,186,653,000	9,692,954,099	79,53 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	Persentase RS siap Akreditasi	1) Jumlah Petugas Penanggung Jawab Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan LP/LS Provinsi mendapat informasi tentang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	100 %	2,137,477,000	70,0 %	86,64 %	4,775,000	4,666,000	97,72 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(SNARS) Edisi 1; 2) Jumlah Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi dan LP/ LS provinsi mendapat informasi tentang kegiatan dan evaluasi kegiatan mutu pelayanan kesehatan; 3) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Rumah Sakit dan koordinasi LP/ LS; 4) Jumlah Peserta Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang tata kelola pelayanan penunjang di RS							
	Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	Persentase Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitasi Pelayanan	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaaan	100 %	638,981,500	100 %	100%	95,049,000	93,634,500	98,51 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kesehatan	Fasilitas Kesehatan							
	Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan	Persentase Kab/Kota yang mempunyai 80% RS dengan pencapaian SPM	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan	78 %	12,356,746,000	33 %	-	506,456,800	501,813,594	99,08 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rujukan;							
	Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional	Persentase RS Regional yang memenuhi standar	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan RTL dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan dalam	88 %	1,933,836,820	50 %	-			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional							
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN								56,839,153,785	47,535,904,156	83,63 %
	Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok Provinsi	95 %	4,687,694,772	91 %	91,12 %	387,194,560	369,762,840	95,50 %
	Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan (Persentase dokumen BA Cabang distribusi alkes)	1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 2) Dokumen Berita Acara Serifikat Distribus Cabangi Penyalur Alat Kesehatan; 3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	3,553,455,906	90 %	87,52 %	120,443,987	116,591,900	96,80 %
	Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan	1) Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di	90 %	8,000,000,000	75 %	75 %	49,045,848	32,169,866	65,59 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mutu Tenaga Kesehatan	kab/kota dan RSUD; 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan data SDMK; 3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan difasilitasi; 4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi; 5) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di wahana; 6) Koordinasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 7) Kab/Kota difasilitasi peningkatan kompetensi tugas belajar; 8) Pengelola tenaga teknis dan tenaga komputer							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SDMK; 9) RSUD yang mengelola Wajib Kerja Dokter Spesialis difasilitasi							
	Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS Jabar; 3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja ; 4) Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti pembekalan program; 6) Koordinasi Pengelolaan	70 %	312,000,000,000	70 %	70 %	56,260,892,390	46,995,802,550	85,53 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan di Kab/Kota							
	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	1) Dokumen penyelenggaraan nakes teladan Puskesmas Teladan; 2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan; 3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi; 4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat; 5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat	90 %	8,800,000,000	75 %	0 %	1,375,000	1,375,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penghargaan;							
	Penguatan Jaminan Kesehatan	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 3) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat Koordinasi dan Evlausi JPKMM di 5 UPTD Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan	95 %	4,073,834,445	90 %	85,51 %	9,967,000	9,967,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Recan Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN							
	Penguatan Pembiayaan Kesehatan	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI Ke Kab/Kota	1) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah DOkumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah;	40 %	3,331,779,280	40 %	40 %	10,235,000	10,235,000	100 %
PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN										
	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	1) Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan 2) Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang	100	2,747,295,000	100 %	100 %	813,427,550	788,982,000	96,99 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kesehatan 3) Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan							
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1). Jumlah Dokumen Laporan dan Kesepakatan 27 Kabupaten/Kota dalam Pembinaan PIS-PK di masing-masing-masing Daerahnya ; 2). Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2021 terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota; 3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Penggunaan Data PISPK dalam intervensi dan perencanaan kegiatan; 4). Jumlah Dokumen Laporan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan BOK di 5	27	18,116,250,000	27	27	26.390,775,000	22,077,389,000	83,66 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wilayah							
UPTD										
1. LABKES										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN								133,573,953,215	98,259,573,867	73,56 %
	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi	Jumlah Parameter Pemeriksaan Lingkup Baru Akreditasi	76 %	1,903,720,000	70	75	223,960,000	173,517,807	77,48 %
	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)	Persentase Kepuasan Pelanggan	Jumlah Pengadaan Reagen	75	400,000	60	70	8,586,683,241	8,099,458,378	94,33 %
	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	1) Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	247	30,890,000,000	241	241	124,763,309,974	89,986,597,682	72,13 %
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN								249,010,381	124,321,600	49,93 %.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi	Jumlah Penambahan Pengunjung	1) Terlaksananya penambahan jenis pemeriksaan terhadap	24000	7,000,000,000			0	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jawa Barat		masyarakat; 2) Terlaksananya kehadiran jumlah seluruh karyawan/karyawati; 3) Terlaksananya penambahan kepuasan pelanggan; 4) Terlaksananya penambahan jumlah peserta Uji Profisiensi							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN LABORATORIUM KESEHATAN										
	Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di Laboratorium Kesehatan	Terpenuhi dan terselenggaranya bentuk dan jenis kesejahteraan pegawai/aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan	100 %	2,441,800,000			5,773,309,790	4,506,430,793	78,06 %.
2. UPELKES										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN								752,398,350	350,048,250	78,63%
	Peningkatan Kualitas Komptensi	Persentase Peningkatan	Jumlah peserta pelatihan;	16,63	10,054,525,576	1,00 %	0,93 %	573,465,000	182,340,000	31,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tenaga Kesehatan	Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan	Bimtek Laboratorium Lapangan; Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat							
	Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan	Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan	Penilaian akreditasi institusi; Persentase pelatihan yang terakreditasi dalam satu tahun; Jumlah Review dan Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga Kerja Non PNS	≥ 3,5	2,732,886,964	≥ 3,5	3,64	178,933,350	167,708,250	93,73%
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PELATIHAN KESEHATAN										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	1) Jasa konsultansi appraisal; 2) Jasa konsultansi perencanaan; 3) Pembelian lahan; 4) Pengadaan tempat tidur	80 %	65,020,414,187	80%	15,000,000	15,176,000	12,950,,000	85,33%
										c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT PELATIHAN KESEHATAN
	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di Upelkes	1) Peningkatan kesehatan jasmani aparatur (senam); 2) Peningkatan kesehatan rohani aparatur; 3) Capacity Building; 4) Pakaian Batik; 5) Pakaian Olah raga; 6) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; 7) Perjalanan dinas dalam	100 %	1,358,653,115	80%		173,100,000	136,100,000	78,63 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			daerah PNS Provinsi; 8) Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; 9) Kursus/pelatihan/ bimtek/sosialisasi							
3. RS AL-IHSAN										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS AL IHSAN	Prosentase pencapaian kenerja atas pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan	80,91 %	1,230,309,698,187	62%	80,45 %	341,963,621,724	303,327,838,515	88.70%.
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS AL-	Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada	80 %	405,901,746,000	67%	80,29 %	52,654,490,773	30,284,534,400	57.52 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lanjutan RSUD Al Ihsan Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan	IHSAN	rawat jalan dan rawat inap							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Al Ihsan	Prosentasi pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	100 %	4,673,770,000			214,695,550	105,676,510	49.22 %
4. RS JIWA										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS JIWA	1).Promosi melalui Road show kab/kota, mobile keliling, pameran Plakat, iklan di media cetak dan elektronik, Banner, Spanduk, Poster/informasi edukasi, Leaflet /Brosur. 2). Makanan dan Minuman Pasien rawat inap, Persentase kebutuhan obat	90 %	9,234,921,696	70 %	88,86 %	61,539,650,098	31,730,729,794	51,56 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan Jiwa RS Jiwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa Akreditasi RS RS Jiwa Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa		pasien yang terpenuhi 100%, Bahan laboratorium, Jumlah Makanan dan Minuman petugas Piket dan potensi resiko, Terpenuhinya honor SDM BLUD, Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telephone, dan internet serta kebutuhan rumah tangga, Pakaian Dinas BLUD, Jumlah Pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan 65 %, Jumlah petugas beresiko terpantau kesehatannya memalui MCU 100 Or, Jumlah tenaga BLUD mendapatkan peningkatan Jiwa Korsa, Persediaan bahan Pemeliharaan gedung non gedung , Biaya Operasional Tenaga Blud untuk Jemput, Pemulangan dan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pendampingan Pasung 75%. 3) Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi NAPZA, Konser Rehabilitan 4). Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi NAPZA, Konser Rehabilitan 5). Outbound Keswara,Pertemuan Evaluasi Pelayanan Medik, Pertemuan Penguatan Program Nasional di RSJ Provinsi Jawa Barat, Workshop Penguatan Jejaring Keswara, Koordinasi internal pelayanan medic 6) Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan pasien pasung 1 Tahun. 7). Tersedianya bahan terapi fungsi pasien, terselanggarakannya Konser Rehabilitan 8). Family gathering, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi TKSK dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) 100 Org, Dropping pasien (pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga, Home visit, mobile outreach (penjangkauan kasus darurat) 24 Kasus, FGD/ Focus Group Discussion (advokasi pasien bermasalah), Membangun							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait keswa (TPKJM), Membangun jejaring dukungan sosial dan pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM, LKS, panti , osialisasi , Sosialisasi deteksi dini bagi guru, kesehatan jiwa kepada care giver, Pelatihan/dukungan psikososial bagi ODGJ, Integrasi pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, Sosialisasi Keswa kepada masyarakat/komunitas, Kegiatan memperingati hari kesehatan jiwa, Hari Bipolar, berkolaborasi dengan LSM, Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan perilaku anak dan remaja, Sosialisasi deteksi dini bagi guru, Sosialisasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			keswa lansia ke petugas panti werda, Penanganan pasien pasung							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa (DAK Reguler)	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS JIWA	Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada rawat jalan dan rawat inap	70 %	7,184,241,476	50 %	47,65 %	5,558,034,584	3,585,446,721	65 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Jiwa	1) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa 2).Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa 3).Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa 4).Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa 5).Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa 6).Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa	100 %	1,830,160,532	60%	62%	13,696,964,149	10,654,801,517	77,79%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa		8).Pembangunan Tahap I							
5. RS PARU										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU										
	Penyediaan Perlengkapan Pasien Penyediaan media informasi RS Paru Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS PARU	Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin	61 %	28,809,966,900	70 %	77,09 %	14,792957,090	13,009,610,078	87,94 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Akreditasi RS Paru Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru (BLUD)		Tingkat Capaian Akreditasi Rumah Sakit Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR)) Jumlah Kerja Sama (MOU) dengan Institusi Kesehatan dalam Penanganan Penyakit TB Paru Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat (NDR) Prosentase pasien yang putus berobat (DO) Cost Recovery							
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PARU										
	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru Pembangunan RS Paru Pengadaan alat-alat kesehatan RS	Jumlah Hari Perawatan di Bagi Tempat Tidur dikali Pasien di Kali 100%	Angka Kesembuhan Pasien Prosentase Pembangunan Gedung dan Bangunan yang terpenuhi sesuai dengan	61%	28,809,966,300	50%	55%	13,554,635,450	12,272,912,827	90,54%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Paru		standart RS Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR))							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PARU										
	Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru Pengadaan peralatan kantor RS Paru Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Paru	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru Penyediaan rapat-rapat dan	100 %	1,221,020,000	75%	78%	15,564,140,901	12,111,608,895	77.82%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru		koordinasi RS Paru Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru							
6. RS JAMPANGKULON										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon Pengadaan Obat dan Bahan Habis	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Jampangkulon		77,12 %	237,000,000,000	76,15%	81,04 %	75,509,181,403	71,432,348,661	94.60%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pakai Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon Penyusunan Laporan Keuangan/Audit Indevenden RSUD Jampangkulon Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD RSU Jampangkulon									
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pembangunan Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon - Pembuatan DED Gedung Rawat Inap, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU Pembuatan AMDAL - Jasa Konsultan perencana berkala	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS JAMPANG	1.Gedung Diagnostic Center 2.Gedung IBS, ICU 3.Gedung Rawat Inap 4.Gedung Instalas Gizi 5.Gedung IPSRS 6.Gedung Jenazah 7.Penataan lahan/Taman 8.Jasa Konsultan	75 %	98,004,742,045	58 %	61,52 %	84,655,132,627	65,671,774,964	77,58%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pembangunan gedung rawat jalan baru dan gedung diagnostic center RSUD Jampangkulon Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon		Pengawasan Gedung Diagnostic, IBS, ICU, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan dan keamanan RS	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Jampangkulon	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon Penyediaan Honor Tenaga	100 %	13,950,000,000			17,568,263,592	13,463,861,663	76,64 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jampangkulon Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon		Medis paramedis RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Jampangkulon Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon							
7. RS PAMEUNGPEUK										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Pelayanan kepada Masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Pameungpeuk	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Pelayanan kepada	86.92	600,000,000	81,91%	82,78 %	41,201,635,452	32,967,801,788	80,02%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk		Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk Pembangunan Mesijd di RSUD Pameungpeuk Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk Pengadaan Alat Kedokteran di	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS PAMENGPEUK	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan	70 %	32,000,000,000	62 %	63,59 %	71,659,559,103	54,084,907,369	75.47 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RSUD Pameungpeuk Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk		Kesehatan untuk Gedung Poli Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan Lainnya Terbangunnya Gedung Poli Ranap Terbangunnya Gedung Loundry Terehabilitasinya IPAL di RSUD Pameungpeuk							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Pameungpeuk	Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek PNS Terbayarnya Gaji Pegawai Medis dan Paramedis, Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas PNS, Terfasilitasinya Pengadaan ATK	100 %	1,163,060,766			13,572,099,021	9,982,263,697	73,55%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. RS KESEHATAN KERJA										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Peningkatan Pelayanan Prima dan Komprehensif Peningkatan Pelayanan di RSUD Kesehatan Kerja Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan Penyusunan Dokumen AMDAL, RPL dan RKL Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Kesehatan Kerja	Jasa Profesi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Non Kesehatan sebanyak 150 orang, Bench Mark 100 org tenaga RSUD KK ke Rumah Sakit Role Model, 500 Dokumen SOP Obat-obatan, formularium rumah sakit, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai Tenaga Kesehatan yang kompeten 250 orang Makanan Pasien 32.850 porsi	70 %	131,400,000,000	62 %	81,3 %	3,179,119,894	2,087,778,048	65,67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Penataan RSUD Kesehatan Kerja Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS KESEHATAN KERJA	Dokumen Perencanaan Dokumen, DED, Perijinan IMB Dokumen Lingkungan Dokumen Luas Lahan Keseluruhan 8 (delapan) Hektar Penyediaan Air Bersih, Penyaluran Air Hujan, Pengolahan Air Limbah, Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penampungan Sampah Sementara, Penyelenggaraan K3RS, Pengendalian infeksi, Tanggap Darurat Alat Kedokteran 200 jenis, Dokumen Rencana Pengadaan Alat Kesehatan	80 %	239,000,000,000	67 %	1,91 %	107,840,676,625	106,424,387,383	98,68%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Penunjang Medis							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor Penyediaan Jasa Kantor Penyediaan Barang dan ATK Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetesi di RS Kesehatan Kerja	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah rapat yang dilaksanakan Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan Jumlah penyediaan jasa kantor Jumlah barang dan Laporan pemanfaatan ATK Jumlah aparatur Dokumen Perencanaan	100 %	10,000,000,000	70%	76 %	17,568,263,592	13,463,861,663	76,64%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dokumen Pelaporan" Dokumen Pengelolaan Keuangan Dokumen Pelaporan Keuangan" Jumlah Sistem Informasi Jumlah Kerjasama Jumlah Kegiatan Pemasaran" Pemeliharaan Alat Kesehatan							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama dan pencapaian target indikator kinerja Program Tahun 2020. Berikut analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program tahun 2020.

2.2.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah/ Biro	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Ratio Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	85/100.000 KH	85,77/100.000 KH	99,10 %
2.	Rasio Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	5.0/1000 KH	3,18/1.000 KH	157,23 %
3.	Prevalensi Stunting	Persen	25,2 %	26,21 %	96,15 %
4.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90 %	73,16 %	82,20 %
5.	Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	99,81 %	95,90 %	96,08 %
7.	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	Persen	48,15 %	100 %	207,68 %

8.	Persentase Rumah Sakit Akreditasi	Persen	68,99 %	88,95 %	128,93 %
9.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage	Persen	90 %	84,46 %	128,93 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja pada Dinas Kesehatan :

a) Rasio Kematian Ibu

Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yaitu 85,77 per 100.000 kelahiran hidup di atas target yang ditetapkan sebesar 85 per 100.000 kelahiran hidup hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus kematian ibu di Jawa Barat yaitu dari 684 kasus pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 yaitu 745 kasus.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2020 kematian ibu tahun 2020 sebesar 745 kasus, ada peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 684 kasus, kenaikan sebanyak 61 kasus. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2020 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan dari peningkatan kasus kematian ibu yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, tidak seluruh kabupaten/ kota memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid-19, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal. Penyebab kematian Ibu antara lain pendarahan sebanyak 27,65%, Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 28,72%, gangguan darah sebanyak 9,80%, Gangguan Metabolik sebanyak 3,49% dan 26,58% disebabkan lain-lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator adalah kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi NSPK baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, penyesuaian pelaksanaan program selama pandemi Covid-19, penyusunan pedoman pelayanan Kesehatan keluarga selama pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

b) Ratio Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, didapat dari jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio kematian bayi tahun 2020 3,18/1000 KH menurun di bandingkan tahun 2019. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian bayi.

Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh 40,04% diakibatkan oleh BBLR, 29,16% disebabkan Asifikasia, 14,91% penyebab lain-lain dan 11,98% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan.

Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 65,11% penyebab lain-lain, 18,91% disebabkan pneumonia, dan 10,53% disebabkan oleh diare. Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2020 jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 2766 bayi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 2861 bayi.

Permasalahan yang dihadapi yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, Pembuatan Pedoman Pelayanan Kesga selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Adapun 10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2020 antara lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bogor.

c) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting yang di Jawa Barat tahun 2020 adalah 26,21% angka tersebut menggunakan baseline studi Status Gizi balita Indonesia tahun 2019. Hasil survei tahun 2020 masih dalam proses pengolahan data sehingga belum ada penetapan prevalensi. Jumlah balita di Jawa Barat adalah 4.308.604 orang. Berdasarkan hasil surveilans gizi tahun 2020 yang diolah dalam elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) balita yang diukur tinggi badan pada bulan agustus adalah 2.897.336 orang dan jumlah balita stunting yang ditemukan sebanyak 277.847 orang (pengunduhan data per 4 Januari 2020).

Permasalahan pertama waktu pelaksanaan survei dilakukan akhir tahun jadi masih membutuhkan waktu pengolahan data, kedua data surveilan gizi belum menggambarkan

seluruh balita karena pengukuran belum mencakup seluruh sasaran balita, dan petugas yang mengukur masih ada yang belum terlatih, serta sarana dan prasarana yang digunakan belum seluruhnya menggunakan alat yang standar. Upaya pemenuhan data dengan memperbaiki kualitas data surveilans gizi sehingga diperoleh data valid dari hasil surveilans gizi jadi tidak tergantung dengan data hasil survei. Dan untuk menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat telah dilakukan aksi konvergesi percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah melakukan orientasi tatalaksana gizi buruk utk petugas puskesmas, melakukan diseminasi PMBA utk petugas puskesmas, advokasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, mendorong kabupaten kota untuk optimalisasi pelayanan gizi selama pandemi dengan mengeluarkan protokol pelayanan gizi semasa pandemi, mendorong kabupaten kota untuk melakukan inovasi pelayanan percepatan penurunan stunting, Melakukan penilaian konvergensi stunting di 20 kabupaten kota lokus, Melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, melakukan sosialisasi pelayanan gizi di masa pandemi, menyusun protokol pelayanan gizi selama pandemik, pembuatan SK Tim Percepatan Penuruan Kematian Ibu, Bayi dan stunting, Pembuatan Draf RAD percepatan penurunan stunting, dan Rapeda Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat.

d) Keberhasilan Program TB

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, capaian tersebut dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19 sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian Sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29 Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasiltas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan

beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

e) Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan.

Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan Obat-obatan dan alat kesehatan), Pada tahun 2020 warga masyarakat yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Jawa Barat sejumlah 548.303 jiwa yang tersebar di 13 Kab/Kota, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kab, Bekasi, Kota Bekasi, Kota depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut.

Permasalahan yang dihadapi ialah masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparatur terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan database/baseline menyebabkan indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi dan belum semua kabupaten kota melaksanakan pelaporan jika terjadi bencana atau KLB wabah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan KLB Wabah bencana alam bidang Kesehatan, Pemantauan Penyakit dan Masalah Kesehatan Matra.

f. Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase puskesmas yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 95,90 %, dimana jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 1.028 puskesmas. Permasalahan capaian th 2020 belum mencapai target yang ditetapkan (99.81), hal ini dikarenakan awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Upaya yang sudah dilaksanakan dalam upaya menjaga mutu pelayanan antara lain pendampingan akreditasi oleh Tim Pendamping tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun reakreditasi.

Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu, Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes. Upaya yang

dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Surveior Akreditasi FKTP Jabar, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19

g) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

Kegiatan Layad Rawat merupakan program inovasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah, program ini bertujuan agar warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat Tahun 2020 Capaian indikator sebesar 100%, dimana guna mendukung program layad rawat, telah di tanda tangani Perjanjian Kerjasama Layad Rawat antara provinsi dengan 27 kab kota, serta telah difasilitasi adanya layanan layad rawat call center Public Service Center (PSC) 119 serta jejaringnya di semua Kabupaten Kota se Jawa Barat. Selain itu juga telah didistribusikan 86 sepeda motor PSC 119 layad rawat ke kab kota pada awal tahun 2020, serta telah diadakan tambahan 20 lagi sepeda motor NMax pada Desember tahun 2020 yang akan segera didistribusikan. Pengadaan kendaraan roda dua untuk mendekatkan akses pelayanan ke daerah yang tidak terjangkau dengan ambulance/kendaraan roda empat.

Permasalahan pelaksanaan layad rawat adalah terkait pandemic covid-19 dimana peran PSC 119 makin diandalkan dalam mendukung system rujukan pasien, pengantaran jenazah, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara belum semua Kab kota memiliki sarana prasarana PSC 119 yang lengkap, SDM pendukung maupun bangunan khusus. Upaya yang sedang dilakukan adalah advokasi kepada kab kota agar ada alokasi dari kab kota untuk kegiatan layad rawat ini baik penambahan sarana prasarana, Gedung maupun SDM

Upaya yang dilakukan ialah Kegiatan Layad Rawat Tahun 2020 melanjutkan kegiatan 2019 yaitu penandatanganan Kerja Sama kegiatan Layad Rawat, pemasangan PSC 119 dan atau jejaringnya yang dilengkapi dengan perangkat lunak PSC dan agent nya di 27 Kabupaten/kota, distribusi kendaraan roda dua Layad Rawat. Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Layad Rawat Terencana dan Layad Rawat Tidak Terencana, merevisi DPA yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Layad Rawat.

h) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 88,95 %, dimana jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 Rumah Sakit. Capaian tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan (68,99%), Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 adalah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Permasalahan untuk mencapai indikator ini ialah Awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Kegiatan pertemuan/ workshop terkait akreditasi upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 Rumah Sakit diefisiensikan.

i) Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)

Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage Tahun 2020 capaian indikator sebesar 85,51 %, dimana jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN adalah sebesar 39.411.879 jiwa (Data 31 Desember 2020) dari total penduduk 46.092.205 jiwa (berdasarkan Dirjen Disdukcapil Kemendagri Semester 1 Tahun 2020).

Permasalahan yang dihadapi ialah kekhawatiran akan turunnya capaian kepesertaan menuju UHC akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu banyaknya pekerja yang di PHK sehingga terputus Jaminan Kesehatannya dan adanya penonaktifan data PBI yang tidak sesuai/tidak valid dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dilakukan penyesuaian capaian target kinerja Tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang semula target capaian 90% menjadi 85%, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama, dan Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait

Jaminan Kesehatan dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020.

Upaya yang telah dilakukan yaitu masing-masing Kab/Kota melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan segmen PPU yang di PHK yang nantinya akan disesuaikan dengan sistem penjaminan didaerah masing-masing, ada yang masuk ke segmen PBI-JK, Peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Peserta PBPU mandiri sedangkan upaya dalam hal penonaktifan data PBI yang tidak termasuk kedalam DTKS yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dalam hal percepatan proses verifikasi dan validasi data oleh masing-masing Dinas Sosial Kab/Kota sehingga data yang sudah valid dapat di entrykan kembali kedalam aplikasi SIX-NG dan bisa mengakomodir masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI-JK.

2.2.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) didukung dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana capaian indikator kinerja Program seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
A	**Program Kesehatan Masyarakat**			
1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	70 %	56,0 %	96.0 %
2	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95%	70 %	59,0 %	97,81 %
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Minum yang Berkualitas	80 %	80,29 %	97,99 %
4	Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat	80 %	82,49 %	96,55 %
5	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	60 %	79,91 %	100 %
6	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	4	4	99,84 %
7	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	4	4	96,61 %
8	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan	70 %	56,0 %	99,25 %

	Kesehatan minimal 88%			
9	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	60 %	0	0

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja outcome untuk setiap program adalah sebagai berikut **:**

1. Program Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat, dengan indikator outcome :

a) Persentase Kab/Kota dengan cakupan Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 88%.

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan tahun 2020 belum mencapai target yaitu 56% (15 kabkota) dari target 70% (19 kab/kota). Dibandingkan dengan tahun 2019, menurun pencapaian sebesar 89% (24 kab/kota). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama terkait pelayanan ANC tertunda sehingga persalinan di faskes tidak terpantau selama pandemi covid19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah, tidak tersedia seluruh kab/kota memiliki fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid 19, Kualitas layanan antenatal, perbedaan sasaran estimasi dan sasaran riil, Pandemi Covid-19, dan refocusing anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, pembuatan pedoman pelayanan kesga selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, supervisi fasilitatif berjenjang terkait kualitas layanan antenatal, koordinasi dan kolaborasi dengan stake holder terkait

b). Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%.

Capaian Kabupaten/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95% tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan laporan dari kabupaten kota belum lengkap, masih dalam proses pengumpulan dan validasi sampai 31 Januari 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah logistik tablet tambah darah tidak dipenuhi 100%, pelayanan pemberian tablet tambah darah

terkendala pandemik covid 19, capaian yang ada baru sebatas distribusi belum ada data konsumsi dan pemantauan minum obat TTD bagi ibu hamil.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pembinaan ke kabupaten kota secara daring dan luring, penyusunan protokol kesehatan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil semasa pandemi, pertemuan sosialisasi pelayanan gizi semasa pandemik, evaluasi progam yang sudah dilakukan.

c). Persentase Penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas

Tahun 2019 realisasi tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2020 dengan target yang sama tahun 2020 (yaitu 80%, disamakan targetnya dengan tahun 2019 mengingat pandemi Covid-19), realisasi tercapai sebesar 80,29%. Hal ini karena petugas Kabupaten/Kota walaupun sedang pandemi Covid-19 tapi tetap melaksanakan pembinaan teknis sampai ke Desa/Kelurahan, disamping pendataan lebih dipertajam lagi. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih kurangnya koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait (dengan anggota Pokja Air Minum dan Sanitasi), terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi melalui virtual meeting dengan Kabupaten/Kota dan lintas sektor (Pokja Air Minum dan Sanitasi), dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

d) Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat

Tahun 2020 target persentase penduduk menggunakan jamban sehat pada masa pandemi Covid-19 dikhawatirkan ada penurunan capaian, ternyata pada tahun 2020 capaian (realisasi) melebihi target, hal ini karena petugas Kab/Kota lebih banyak melakukan pemicuan dan pendataan walaupun dengan kondisi terbatas karena pandemi Covid-19. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah koordinasi dengan lintas sektor yang masih kurang terutama dalam berkolaborasi dan bersinergi terkait lokasi desa sasaran yang penerima bantuan (dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Kab/Kota), Terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

e) Persentase Puskesmas di Kab/Kota menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja pada tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, pencapaian target di tahun 2019 ini merupakan upaya terintegrasi program kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan, dampak positif dalam hal ini adalah kemajuan pesat pelaksanaan kesehatan kerja. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja sebagai needs dari semua aspek pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu puskesmas di Kabupaten/Kota mengharuskan pelayanan kesehatan kerja internal melalui pelaksanaan K3 puskesmas yang tercantum pada penilaian akreditasi puskesmas, yang menjadikan hak asasi dari setiap pekerja, lingkungan, pasien dan masyarakat untuk selamat, sehat, aman dan nyaman ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas. Pelaksanaan kesehatan kerja eksternal melalui upaya penggerakan dan pemberdayaan kesehatan kerja di sektor nonformal, yang menduduki 60% dari seluruh jenis pekerjaan pada penduduk di Jawa Barat. Sehingga komitmen pelaksanaan program kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai produktifitas masyarakat pekerja.

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja didapatkan sebesar 79,91%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab/kota dalam menyelenggarakan kesehatan kerja. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak bulan maret 2020, kegiatan – kegiatan di fokuskan dalam upaya pengendalian pencegahan Covid-19. Sehingga menjadi tantangan dalam pencapaian indikator outcome. Puskesma kab / kota dalam melaksanakan kegiatan kesehatan kerja yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dari indikator outcome, yang secara sinergisitas di lakukan juga dengan dukungan kab/kota, sehingga kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tingkat puskesmas sesuai dengan pencapaian tujuan indikator outcome.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah terjadinya kondisi pandemic Covid-19, dimana seluruh pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan pada pertengahan bulan maret sampai dengan bulan mei, penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dibeberapa wilayah atau Kab/ Kota yang merupakan menjadi target percepatan pencapaian indikator outcome dari kesehatan kerja sempat stagnan dibeberapa bulan, awal penetapan pandemic. Selain itu adalah efisiensi anggaran, yaitu dengan merefokusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan upaya percepatan diawal tahun 2020, dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas melalui orientasi kesehatan kerja untuk Kepala Seksi yang bertanggung jawab pada program kesehatan kerja dan petugas atau pengelola kesehatan kerja. Hal ini sangat efektif dalam percepatan capaian indikator outcome kesehatan kerja. Kedua adalah, kondisi pandemik Covid-19 menjadikan concern pada puskesmas maupun fasyankes untuk melaksanakan pelayanan yang safety, dimana peningkatan capaian penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), dan sebagainya, pandemi Covid-19 juga membawa dampak kreatifitas dalam pelaksanaan program program kesehatan kerja, yaitu dimana kegiatan dapat tetap dilaksanakan secara daring, yang dapat diikuti oleh banyak target sasaran pencapaian program kesehatan kerja.

f) Persentase Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya didapatkan sebesar 86%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab / kota dalam pelaksanaan kesehatan olahraga.

Berdasarkan penyebab keberhasilan dari indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya adalah fokus pembuatan perencanaan kegiatan – kegiatan pada tahun 2020 dalam pencapaian target outcome, kegiatan yang langsung pada sasaran capaian yaitu:

1. Seluruh masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas fisik, bergerak dan olahraga sesuai dengan BBTT (Baik, Benar, Terukur, dan Teratur), pembinaan kelpompok – kelompok Olahraga di masyarakat.
2. Pembinaan kebugaran CJH (Calon Jemaah Haji), meskipun pada situasi pandemi Covid-19, Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya untuk tahun 2020, akan tetapi pelaksanaan pengukuran kebugaran CJH diawal tahun tetap dilaksanakan (januari s.d maret 2020), dan pelaksanaan di akhir tahun 2020 pada bulan november s.d desember tetap dilaksanakan, dengan metode pengukuran kebugaran secara mandiri melalui aplikasi SIPGAR
3. Pembinaan kebugaran anak sekolah, dengan melalui daring, pembinaan kepada guru – guru olahraga di beberapa kabupaten kota tetap dilaksanakan, penyampaian informasi dan edukasi kepada orang tua murid, untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan bergerak untuk siswa – siswa meskipun dilaksanakan dirumah masing – masing.
4. Pembinaan kebugaran di OPD, dengan melakukan sosialisasi SIPGAR, sehingga kondisi pandemi Covid-19 tidak menghalangi untuk pengukuran kebugaran.

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 60% didapatkan realisasi sebesar 86%. Pencapaian realisasi di tahun 2020 yang sangat siginifikan, hal ini disebabkan antara lain adalah proses tahapan pelaksanaan kegiatan yang stimultan dan berkelanjutan dari tahun 2019, yaitu kegiatan yang spesifik dan measurable dalam pencapaian indikator outcome, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan dukungan dari pusat baik pemberian stimulant kit kebugaran untuk kabupaten/kota, anggaran dana dekonsentrasi, dsbnya.
2. Pelaksanaan kegiatan bertujuan peningkatan skill, kapasitas, pembekalan ataupun orientasi bagi petugas kesehatan olahraga di kabupaten/kota dan puskesmas. Kegiatan orientasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh dinkes provinsi akan tetapi juga oleh BKOM (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat), dan kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran BOK ataupun APBD
3. Pelaksanaan kegiatan dengan pembinaan secara terintegrasi melalui tahap monitoring, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan umpan balik dari setiap selesai kegiatan, tujuannya adalah kabupaten / kota mengetahui dan memahami apa yang menjadi tahapan lanjutan untuk pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan terjadinya kondisi pandemi Covid-19, dimana sama halnya dengan program kesehatan kerja, program kesehatan olahraga terkena dampak dalam proses pencapaian indikator outcome. Pada awal pandemi Covid-19, Masyarakat di Jawa Barat terhenti keseluruhan dalam kegiatan olahraga. Pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang sudah memiliki kebiasaan berolahraga baik olahraga berkelompok maupun individu. Penurunan aktivitas fisik dan berolahraga berdampak pada stagnannya laporan pembinaan kelompok olahraga, yang merupakan subouput dalam pencapaian indikator outcome. Selain itu refocusing anggaran yang hanya terfokus pada pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19. Seluruh petugas di puskesmas dan kabupaten /kota terfokus pada pengendalian Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah kegiatan yang harus terintegrasi dalam rangka pengendalian Covid-19, yaitu bagaimana kesehatan olahraga sangat berperan dalam peningkatan imunitas pada masa pandemi Covid-19. Dengan protokol kesehatan olahraga secara individu dapat dilakukan, kegiatan olahraga di masyarakat dapat dilakukan dan pembinaan – pembinaan kebugaran dapat dilaksanakan. Diawal tahun 2020, petugas kesehatan olahraga kabupaten / kota mendapatkan orientasi pelaporan SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga), hal ini menjadi sangat penting

bahwa setiap kegiatan – kegiatan kesehatan olahraga yang kabupaten / kota maupun puskesmas laksanakan bisa dilaporkan. Kegiatan ini siginifikan membantu dalam pencapaian indikator outcome.

Pada tahun 2020, dalam upaya pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah dengan melibatkan pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga secara terintegrasi, seperti halnya dalam pelaksanaan orientasi K3 perkantoran, dimasukkan juga perihal pengukuran kebugaran pekerja, yaitu sebagai indikator produktivitas pekerja, asumsinya adalah ketika pekerja itu bugar maka produktivitasnya akan meningkat, Upaya lain yang dilakukan di tahun 2020 dalam rangka pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah pelaksanaan kegiatan – kegiatan daring yang bersifat up to date dengan melakukan survey – survey secara online, sehingga petugas kesehatan olahraga di kabupaten / kota dan puskesmas mengetahui kondisi dan status pelaksanaan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

g) Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan harus dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan dimasa pandemi semua kegiatan dilaksanakan secara online.

Pembinaan melalui tokoh masyarakat yang sudah tergabung dengan Forum Komunikasi (Forkom) Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat. Berkolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait, Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan. Melibatkan dalam kegiatan Bidang Kesehatan melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (GEMA) 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Pakai Sabun).

2. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
B.	**Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**			**96,65 %**
1	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	89 %	73,16 %	95,41 %
2	Persentase Pasien HIV Yang Diobati	45 %	42 %	97,21 %.
3	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mencapai UCI >90%	90,5 %	44,8 %	99,42 %
4	Persentase Kab/Kota 50% Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	60,0 %	44,44 %	92,82 %

5	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	80 %	96 %	98,46 %
6	Persentase Kab/Kota yang Mencapai IR DBD <49/100.000 Penduduk	90 %	55,55 %	98,32 %
7	Persentase Kab/Kota Sudah Eliminasi Malaria	93 %	93 %	97,68 %
8	Proporsi Cacat Kusta Tingkat II	< 10 %	6 %	97,61 %
9	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	45 %	27,27 %	98,97 %
10	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Rabies	88 %	88 %	90,90 %
11	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	55 %	51,69 %	98,80 %
12	Persentasi penduduk mengalami gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	74 %	88,44 %

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai outcome Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, tidak mencapai target yang diharapkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19 sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan

mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29 Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasiltas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

b) Persentase Pasien HIV yang di obati

Jumlah ODHA on ARV atau persentase pasien yang diobati di tahun 2019 hanya 40% dikarenakan belum semua faskes terdapat pengobatan ARV sedangkan di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2% pada pasien HIV yang diobati. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini pada masa Pandemi Covid 19 ini ialah tidak semua pasien mau datang ke Fasyankes, adanya pembatasan ODHA yang datang ke layanan Fasilitas Kesehatan, dan adanya keterlambatan stok ARV karena terjadi Pembatasan Sosial Bersekala besar di kab/Kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan logistic ke Kab/Kota, Bimbingan Teknis Pelayanan Perawatan 2 Dukungan pada ODHA, Validasi Data ODHA, dan Pelatihan Layanan PDP pada 190 Layanan.

c) Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%

Pada Tahun 2019, capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat mencapai 93.8% yang berarti telah melebihi 90%. Namun pada tahun 2020 capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat, data s.d Triwulan 3 baru mencapai 44.8%, belum mencapai target 2020 sebesar 90.5%. Hal ini sangat jauh dari pencapaian tahun 2019, karena mulai bulan Maret 2020 pelayanan imunisasi di Provinsi Jawa Barat sempat terganggu karena adanya Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi sempat terhenti karena adanya surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk tidak membuka Posyandu dan Puskesmas hanya untuk pelayanan orang sakit.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk menghentikan posyandu dan pelayanan imunisasi di puskesmas karena adanya Pandemi Covid-19 (sekitar bulan April-Mei), Petugas Imunisasi baik Pengelola Program Imunisasi di Kabupaten/Kota dan Koordinator Imunisasi di Puskesmas terlibat dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti ikut dalam tracing kontak dan pemegang data Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan imunisasi, orang tua khawatir membawa anaknya imunisasi karena takut tertular Covid-19, sempat kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pelayanan imunisasi.

Pada triwulan 4, sudah mulai disibukkan dengan persiapan imunisasi Covid-19 sehingga pekerjaan menjadi bertambah dan harus membagi waktu dengan kegiatan imunisasi

rutin. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) Petugas Imunisasi ke Gugus Tugas Provinsi, melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) ke Pusat, melakukan koordinasi dengan pengelola program imunisasi Kab/Kota melalui zoom meeting, Membuat surat edaran mengenai petunjuk teknis pelayanan imunisasi selama masa Pandemi Covid-19, membagikan dan sosialisasi buku petunjuk teknis pelacakan anak yang belum diimunisasi (Defaulter Tracking) kepada Kab/Kota, dan berkoordinasi dengan lintas sector seperti gugus tugas, TP PKK dll untuk mendukung kegiatan imunisasi.

d). Peresntase Kab/Kota yang 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneomonia balita sesuai standar

Penurunan ini dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah, untuk realisasi 44,44% masih belum final dikarenakan masih menunggu laporan dari kabupaten kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tepat menjalankan pelayanan di Puskesmas secara optimal, pemberian/pendistribusian logistic berupa rapid test antibody ke 27 Kab/Kota, pendistribusian vitamin dan multivitamin ke 27 Kab/Kota dan RS yang ada di wilayah masing-masing, dan pembentukan RS SIBI di Kota Sukabumi tepatnya di RS R Syamsudin.

e) Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil

Dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tetap melaksanakan pelayanan DDHB di Puskesmas secara optimal, pemberian/ pendistribusian logistic berupa rapid test HbsAg dan HbIg ke 27 kab/kota, monitoring pelaksanaan pengendalian HPISP ke 6 kab/kota, Pelatihan SIHEPI di Kabupaten Purwakarta, Pertemuan Validasi Data HPISP untuk 27 kab/kota secara daring, dan Pertemuan Kegiatan Manajemen Zinc pada Balita Diare di Lokus Stunting di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.

f) Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk

Tahun 2019 realisasi 55,55% (sebanyak 15 kabupaten/kota dengan Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk), hal ini tahun 2019 data kasus di semua kabupaten/kota meningkat dibandingkan data tahun sebelumnya. dan kemudian pada tahun 2020 kasus DBD jumlahnya hampir di semua kabupaten/kota sama dengan tahun 2019, namun setelah di jumlah masih dibawah tahun lalu.

Untuk target tahun 2020 ada peningkatan kasus DBD di setiap Kabupaten/Kota, sehingga pencapaian tahun 2020 tidak sesuai target yaitu sebanyak 15 Kabupaten/Kota mencapai Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk. Justifikasi sebagai target adalah IR ≤ 49/100.000 penduduk adalah Target global untuk pengendalian DBD adalah penurunan angka kasus 25 % pada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik belum optimal, Kurangnya Sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk program DBD, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian DBD, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam pengganggaran program pencegahan dan penanggulangan DBD.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD, Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD, dan Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD.

g) Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria

Tahun 2019 realisasi 85% (sebanyak 23 kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi malaria), hal tersebut karena tidak ada kasus penularan setempat hanya kasus import saja, namun pada bulan April kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria sehingga pencapaian menjadi 93 %. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada 2 (dua) kabupaten yaitu kab sukabumi, pangandaran masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria, masih di temukan kasus malaria penularan setempat, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian Malaria, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam pengganggaran program Penanggulangan dan pencegahan penyakit Malaria.

Tahun 2019 realisasi 85% (sebanyak 23 kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi malaria), hal tersebut karena tidak ada kasus penularan setempat hanya kasus import saja, namun pada bulan April kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria sehingga pencapaian menjadi 93 %. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada 2 (dua) kabupaten yaitu kab sukabumi, pangandaran masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria, masih di temukan kasus malaria penularan setempat, Belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian Malaria, dan Masih belum kuatnya komitmen

pemerintah daerah setempat dalam pengganggaran program Penanggulangan dan pencegahan penyakit Malaria.

i) Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis

Analisis penyebab kegagalan pencapaian indicator outcome dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Kegiatan Monitoring & Evaluasi dapat dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten/Kota karena tidak ada kendala yang berarti sama sekali sehingga kegiatan Survei Penilaian Kejadian/TAS dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Monitoring & Evaluasi dengan Survei Penilaian Kejadian/TAS pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dan pendanaan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut pada BBTKL-PP Kementerian Kesehatan digunakan untuk focusing penanganan Covid - 19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya pandemic Covid-19 sehingga banyak kegiatan untuk Monitoring dan Evaluasi Eliminasi Filariasis tidak bisa terlaksana terkait dengan peraturan yang tidak diperbolehkan mengumpulkan massa/kerumunan dan anak sekolah sebagai sasaran pemeriksaan antigen Filariasis harus belajar secara on line tidak tatap muka.

Anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan mengalami efisiensi mencapai sebesar 70%. Semua Kabupaten/Kota fokus pada penanganan Covid-19 sehingga kegiatan untuk meningkatkan upaya eliminasi Filariasis tidak berjalan sama sekali, dan terdapat beberapa petugas pengelola program Puskesmas maupun Kabupaten/Kota yang terinfeksi Covid-19 atau kontak erat dengan kasus Covid-19 sehingga banyak kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya/tertunda.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indkator ini adalah mengadakan Pertemuan Koordinasi pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan pada masa pandemic Covid-19 secara Virtual, Bimbingan teknis Filariasis pada 2 Kab/kota dan bimbingan pengendalian cacingan pada 3 Kab/Kota, Pendampingan POPM Cacingan pada 18 Kab/Kota, Pemantauan POPM Cacingan pada 20 Kab/Kota, dan melakukan koordinasi terkait penemuan kasus dan tatalaksana kasus Filariasis pada 27 Kab/Kota, baik pada saat adanya permintaan narasumber Pertemuan di Kab/Kota maupun pada saat melakukan fasilitasi ke Kab/Kota.

j) Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies

Tahun 2019 Jawa Barat mempunyai 4 (empat) daerah endemis Rabies dan mempunyai target I (satu) kabupaten bisa mencapai eliminasi. Tahun 2019 target bisa di realisasikan dan 1 (satu) kabupaten/kota bisa eliminasi sehingga tahun 2020 Jawa Barat mempunyai 3 daerah endemis Rabies. Tahun 2020 di targetkan 1 (satu) kabupaten/kota bisa eliminasi tetapi target tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga sampai akhir tahun 2020 masih mempunyai 3 daerah endemis rabies.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah kondisi pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kegiatan program zoonosis baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, anggaran untuk program Zoonosis di efisiensi kurang lebih sebesar 75%, begitu pula dengan anggaran untuk program Zoonosis di kabupaten/kota, dan semua tenaga, sarana di fokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah bimbingan teknis dan monitoring kegiatan pengendalian program Zoonosis ke 11 kabupaten/kota, pertemuan evaluasi program Zoonosis dan validasi data kasus Zoonosis di 27 Kabupaten/Kota secara Daring. Konsultasi program Zoonosis ke Subdit Zoonosis Kementrian Kesehatan RI, koordinasi lintas sektor dan lintas program, dan pemenuhan kebutuhan logistik program zoonosis untuk 27 kabupaten/kota.

k) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih banyak pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas yang belum terlatih, sering terjadi pergantian pengelola Program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas, dan pencatatan dan pelaporan di puskemas melalui Portal Web belum optimal dikarenakan masih banyak pengelola program yang belum terlatih sehingga data bisa under reporting.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas melalui pelatihan pandu PTM dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Selain itu membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan, dan meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM.

l) Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Hasil capaian presentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan akses untuk pelayanan di puskesmas terbatas, hanya untuk pelayanan asidentil, kepatuhan penderita gangguan jiwa untuk berobat masih rendah, masalah kesehatan jiwa masih merupakan stigma di masyarakat, dan ketersedian obat jiwa masih mengandalkan dari Kemenkes, untuk Kabupaten/Kota masih terbatas dalam penyedian obat jiwa.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pertemuan virtual Orientasi Program Keswa bagi Petugas Kab/Kota dan Puskesmas yang telah diselenggarakan oleh Program Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pelatihan virtual Program Resiliensi Kesehatan Mental Pada Tenaga Kesehatan di Jawa Barat yang didukung oleh

HOPE dan KUN, pertemuan virtual koordinasi dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa beserta pengelola program Keswa di Kab/Kota, dan Sosialisasi virtual untuk SISKEWA (Sistem Informasi Kesehatan Jiwa) Bagi Pengelola Program Keswa di Kab/Kota dan puskesmas.

3. PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Kesehatan Akibat Bencana & Kesehatan Akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi			**100,00 %**
1	Persentase kegiatan Rapid Health Assesment	100 %	100 %	100,00 %
2	Persentase masyarakat yg dilayani di lokasi bencana	100 %	100 %	100,00%

Program kesehatan akibat bencana dan kesehatan akibat kejadian luar biasa (KLB) provinsi mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment

Pada tahun 2020 pelaksanaan Rapid Health Assesment (RHA) pada kondisi bencana alam masih dilaksanakan oleh tim RHA sesuai prosedur sehingga pemantauan dan atau pelayanan kepada masyarakat yang terdampak krisis masih berjalan walaupun kondisi sedang dalam Pandemi Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sehingga capaian tahun 2019 dan 2020 masih sesuai target.

Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 masih terbatasnya SDM dan banyaknya Petugas Kabupaten /Kota yang belum terlatih untuk melaksanakan RHA.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan KLB wabah bencana alam bidang kesehatan, pemantauan penyakit dan masalah kesehatan matra.

b. Persentase masyarakat yang dilayani dilokasi bencana

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019 dan 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan),

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak krisis tidak mengalami permasalahan yang berat, walaupun dengan kondisi pandemi covid-19 semua masyarakat dilokasi pengungsian dapat dilayani seluruhnya, hanya ada beberapa lokasi yang kekurangan APD dan obat namun langsung dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinkes Provinsi Jawa Barat, tidak berfungsinya secara optimal kendaraan operasional roda empat dan roda dua milik program bencana. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan Tahun 2019 adalah salah satunya menyediakan stok Obat-obatan dan alat kesehatan yang dialokasikan untuk memfasilitasi Kab/Kota yang kekurangan pada saat terjadi bencana, mengajukan pengadaan kendaraan Operasional bencana pada Tahun anggaran 2021.

4. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

No	Indikator Kinerja Program	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN			**78,97 %**
1	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	100 %	94,92 %	94,69 %
2	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	30 %	85,20 %	
3	Persentase Kab/Kota Puskesmas sesuai standar	86 %	82 %	43,37 %
4	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	72 %	75,23 %	29,40 %.
5	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait layad rawat	48,15 %	100,0 %	79,53 %
6	Persentase RS siap Akreditasi	70,0 %	86,64 %	97,72 %
7	Persentase Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	100 %	100%	98,51 %
8	Persentase Kab/Kota yang mempunyai 80% RS dengan pencapaian SPM	33 %	-	99,08 %.
9	Persentase RS Regional yang memenuhi standar	50 %	-	

Program Pelayanan Kesehatan mempunyai outcame meningkatnya pembinaan dan Pengendalian Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Puskesmas siap akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas terakreditasi masih tetap (1.028 pusk) sedangkan pembaginya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentasi sebagai hasil pembaginya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Pendampingan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun yang akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan optimal, melihat kondisi dilapangan, bila ada kasus maka pendampingan tidak dilakukan, Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu. Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, dan Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Surveyor Akreditasi FKTP Jawa Barat, dan menindaklanjuti edaran kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

b). Persentase kab/kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi

Capaian persentase Kabupaten/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi pada tahun 2020 sebesar 85,20%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 masih sama sebesar 85,20%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (19%) ataupun target tahun 2020 (30%), sudah mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini

dicabut, dan beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan pendampingan pasca akreditasi labkes, mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan.

c. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas sesuai standar masih tetap (888 pusk) sedangkan pembaginya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentasi sebagai hasil pembaginya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas menjadi lebih fokus pada pemberian pelayanan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa Pandemi Covid 19, mengingat pada masa pandemi banyaknya masyarakat dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga anggaran untuk pemenuhan puskesmas sesuai standar banyak dialihkan untuk penanggulangan Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengintegrasikan dengan kegiatan Satgas Covid 19 kegiatan monitoring dan pembina ke puskesmas agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar pada masa pandemi, dan mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes terutama terkait pelayanan pada masa pandemi.

d) Persentase kab/kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan obat tradisional

Capaian persentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional pada tahun 2020 sebesar 75,23%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 adanya peningkatan sebesar 8,56% dari capaian 66,67%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (64%) ataupun target tahun 2020 (72%), sudah mencapai target yang ditetapkan. Definisi operasional puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional adalah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain : a. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan (pemanfaatan taman obat keluarga) dan keterampilan (akupresur

untuk keluhan ringan), b. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan, meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional, c. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional (akupuntur untuk dokter, akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya Pandemi Covid-19 menimbulkan efisiensi anggaran.

Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di tahun 2020 berkurang, dari 5 kegiatan menjadi 1 kegiatan karena adanya efisiensi anggaran, dan kegiatan dilaksanakan mendekati akhir tahun (September 2020). Kegiatan yang tidak dapat terlaksana tahun 2020 antara lain : Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional, Pertemuan Validasi dan Sinkronisasi Data program Pelayanan kesehatan Tradisional, Sosialisasi SP3T Provinsi Jawa Barat, Konsolidasi Penapisan dan Pengembangan Penyehat Tradisional (SP3T) Yankestrad, dan kegiatan yang dapat terlaksana tahun 2020 adalah monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL, akan tetapi kegiatan ini terlaksana di 15 kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota yang dialokasikan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL di 15 Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta, menindaklanjuti surat edaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta Nomor HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit dan Perawatan Kesehatan, Surat Nomor HK.01.07/IV/870/2020 tentang Protokol Kesehatan Pelayanan SPA dan salon di Era New Normal Pandemi Covid-19, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e) Persentase kab/kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait Layad Rawat

Tahun 2019 kegiatan Layad Rawat di Provinsi adalah melengkapi kegiatan Layad Rawat berupa pemenuhan regulasi yaitu dengan tersusun dan ditetapkannya nya Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layad rawat di Provinsi Jawa Barat, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Layad Rawat, serta pembahasan kerja sama dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor tentang Pelaksanaan Layad Rawat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layad Rawat di 27 Kabupaten/kota, advokasi keberlangsungan kegiatan Layad Rawat di Kab/Kota.

f) Persentase Rumah Sakit siap Akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 RS (hanya bertambah 2 RS bila dibandingkan capaian akhir th 2019) sedangkan pembaginya (jumlah Rumah Sakit teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 376) sehingga mempengaruhi persentasi sebagai hasil pembaginya, tetapi bila dibandingkan dengan target Rumah Sakit terakreditasi tahun 2020 (68,99%) sudah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan

(86,65%.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS, menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

g) Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi

Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan visitasi ke rumah sakit, jika hasil visitasi sesuai dengan standar maka rekomendasi akan di buat dan di sampaikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Semua permohonan yang masuk ke dinkes dari DPMPTSP sudah dilakukan visitasi dan sudah dibuatkan rekomendasinya. Jumlah permohonan sebanyak 17 RS dari DPMPTSP dan semuanya sudah dilakukan visitasi dan diberikan rekomendasi.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah jika sudah mendekati akhir tahun dana untuk visitasi sudah tidak ada lagi. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah dilakukan visitasi dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakitnya.

h) Persentase kab/kota yang mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

i) Persentase Rumah Sakit Regional yang memenuhi standar.

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

5. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK)

Program Sumber Daya Kesehatan mempunyai *outcome* meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator *outcome* :

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Sumber Daya Kesehatan			**83,63 %**
1	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	91 %	91,12 %	95,50 %
2	Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan (Persentase dokumen BA Cabang distribusi alkes)	90 %	87,52 %	96,80 %
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	75 %	75 %	65,59 %.
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	70 %	70 %	85,53 %
5	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	75 %	0 %	100 %
6	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	90 %	85,51 %	100 %
7	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI Ke Kab/Kota	40 %	40 %	100 %

a). Persentase Ketersediaan Obat Esensial

Target Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kenaikan jumlah item obat yang menjadi indikator Ketersediaan Obat Essensial dari semula 20 jenis item obat menjadi 40 jenis item obat, sehingga target di tahun 2020 menjadi 91%. Realisasi Persentase Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 92,12% pada tahun 2020 terdapat penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 94,33%. Namun masih dapat melebihi target yang telah di tentukan. Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada dipuskesmas, obat wajib tersebut semula sebanyak 20 jenis item tetapi sekarang yang diwajibkan sebanyak 40 jenis item, dengan rincian obat : Albendazol /Pirantel Pamoat, Alopurinol, Amlodipin/Kaptopril, Amoksisilin 500 mg, Amoksisilin sirup, Antasida tablet kunyah/ antasida suspensi, Asam Askorbat (Vitamin C), Asiklovir, Betametason salep, Deksametason tablet/deksametason injeksi, Diazepam injeksi 5

mg/ml, Diazepam, Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin, Difenhidramin Inj. 10 mg/ml, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl), Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam Oralit serbuk, Glibenklamid/Metformin, Hidrokortison krim/salep, Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi, Lidokain inj, Magnesium Sulfat injeksi, Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml, Natrium Diklofenak, OAT FDC Kat 1, Oksitosin injeksi, Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml, Parasetamol 500 mg, Prednison 5 mg, Ranitidin 150 mg, Retinol 100.000/200.000 IU, Salbutamol, Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik, Simvastatin, Siprofloksasin, Tablet Tambah Darah, Triheksifenidil, Vitamin B6 (Piridoksin), dan Zinc 20 mg.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pada tahun 2020 terdapat penambahan jenis obat yang menjadi Indikator Ketersediaan Obat Essensial dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mensosialisasikan kepada Kab/Kota untuk menambahkan jenis obat yang menjadi indikator ketersediaan obat dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

b) Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan.

Pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi untuk persentase rekomendasi perijinan yang di keluarkan, adapun realisasi pada tahun 2019 adalah 87,77% dan pada tahun 2020 adalah 87,52%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini adanya refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mengakibatkan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan sarana di batasi.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk dapat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi proses perizinan terkait izin PBF Cabang, PAK dan UKOT untuk dapat di proses dengan semaksimal mungkin proses perizinan dapat terakomodir dengan baik.

c) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan

Dalam Pengelolaan Mutu Tenaga terdapat beberapa program di dalamnya yaitu kegiatan pengelolaan Data SDMK, data rencana kebutuhan, Tubel reguler, Tubel Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Legalisir STR, Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR TTK), Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS), Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan TKWNA. Meskipun terdapat efisiensi anggaran di tahun 2020, kegiatan mutu SDMK dapat dilaksanakan melalui kegiatan zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan kegiatan virtual yang diselenggarakan melalui DPA Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan. Kegiatan Virtual tetap mencapai output yang ditargetkan di tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah secara kualitas bermasalah karena keterbatasan interaksi. Terdapat masalah komunikasi yang disebabkan mekanisme virtual dan pemenuhan berkas secara online. Keterbatasan pendampingan secara klasikal yang mengurangi kualitas pemahaman sasaran program.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memastikan virtual zoom meeting dengan evaluasi mekanisme pelaksanaannya agar meningkatkan kuantitas dan kualitas penyampaian informasi program. Dengan melaksanakan kegiatan tambahan virtual meeting pada kegiatan program yang bersifat teknis program.

d) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan

Berkurangnya jumlah nakes Non PNS tahun 2019 sebanyak 940 menjadi 852 untuk tahun 2020 disebabkan karena mengundukan diri dengan alasan karena diterima CPNS. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tidak dapat mengevaluasi kinerja secara langsung pada peserta Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat yang bertugas di 27 Kabupaten/ Kota baik yang bertugas di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah evaluasi kinerja didelegasikan langsung ke atasan langsung peserta tenaga kesehatan non PNS Provinsi Jawa Barat dan memanfaatkan aplikasi online sebagai sarana di masa pandemi untuk evaluasi kinerja.

e) Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan

Untuk indikator persentase tenaga kesehatan mengikuti pemilihan tenaga kesehatan puskesmas teladan Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran hampir 100% sehingga kegiatan nakes teladan ditiadakan. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Refokusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga sehingga kegiatan nakes teladan ditiadakan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemberian penghargaan bagi tenaga relawan dan tenaga nakes non pns yang mengundurkan diri dengan memberikan surat keterangan masa bakti.

f) Persentase Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan

Pada indikator persentase penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan terjadi kenaikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, tapi untuk tahun 2020 masih melum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan sampai sepuluh tahap dari Kementerian Sosial sehingga sangat menpengaruhi jumlah kepesertaan dan capaian Universal Health Coverage. Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait Jaminan Kesehatan

dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan sosialisasi kepada pihak terkait tentang regulasi Perpres No 64 tahun 2020 dan Permendagri No.64 tahun 2020, koordinasi Lintas Sektor, koordinasi evaluasi Pembiayaan Kesehatan dan Penyusunan PHA/DHA (p).

g) Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kab/Kota

Target Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota tiap tahun 2019 dan tahun 2020 sama sebesar 40% sesuai dengan pergub No. 62 tahun 2015, Realisasi Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 40%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tahun 2020 keluar regulasi baru terkait besaran premi, sehingga ada perhitungan kebutuhan yang disesuaikan dengan regulasi tersebut, dan sebagian pengganggaran masuk ke perubahan sehingga baru bisa dicairkan oleh kab/kota di akhir desember.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah koordinasi dengan BPKAD dan Kabupaten/Kota untuk proses pencairan dan pemanfaatan dana alokasi.

6. PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN
	Program Manajemen Kesehatan			
1	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27	27	100 %

Program Manajemen Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya layanan manajemen kesehatan, dengan indikator outcome :

a) Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat. Untuk indikator Persentasi Draf Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ialah sebanyak 7 Dokumen Draf

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, 7 dokumen tersebut ialah:

1. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Hospital By Laws (HBL) Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
2. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat masa Tugas 2020
3. Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat
5. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat
7. Draft Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.1359-1359-Dinkes/2018 tentang keanggotaan badan pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat

b) Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Telah dilakukan pembinaan terkait Pelaksanaan BOK di kab-kota melalui evaluasi pelaksanaan setiap triwulan. Dimana kab/kota melaporkan hasil evaluasi per triwulan melalui aplikasi e-renggar milik Kementerian Kesehatan yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi ini diserahkan atau diteruskan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar sebagai bahan pertimbangan Kementerian Kesehatan terkait usulan perencanaan tahun berikutnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan kabupaten yang ada di Jawa Barat terutama kabupaten yang berada di Jawa Barat bagian selatan maupun perbatasan dengan provinsi lain terutama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah yaitu masih ditemukan kesenjangan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Pemenuhan rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter spesialis, yang bekerja di rumah sakit terhadap jumlah penduduk dan pemenuhan rasio jumlah tempat tidur terhadap jumlah penduduk menjadi sangat penting terutama di wilayah perbatasan dan wilayah Jawa Barat Selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran.

Selain itu telah dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya adaptasi terhadap situasi pandemi covid-19 melalui program Jawa Barat Juara (Jabar Juara), yaitu:

a. Layad rawat

   Layad rawat merupakan program pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya ke rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan pelaporan dan panggilan darurat melalui telepon (*Hotline*) atau media online lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Puskesmas Juara

   Puskesmas juara adalah menciptakan puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terakreditasi serta menjadi tambahan ketersediaan sumberdaya kesehatan dalam menghadapi kebencanaan daerah. Pada masa pandemic covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program PUSPA yang bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat. Program PUSPA berupaya menerjemahkan nilai-nilai keilmiahan, inovasi, dan juga kolaborasi. Program ini merekrut tenaga kesehatan sebagai *Field Officer* yang ditugaskan di di puskesmas-puskesmas di kota/kabupaten di Jawa Barat.

c. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit

   Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah kabupaten/kota terutama di daerah perbatasan yang menjadi kewajiban provinsi, pengembangan pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan dan pusat kegiatan lokal, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan / pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, merevitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan melakukan revitalisasi rumah sakit tipe C menjadi tipe B.

d. Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN).

   Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 setelah mempertimbangkan kinerja Dinas Kesehatan dengan rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Hasil review antara rancangan awal Renja Dinas Kesehatan dengan rancangan awal RKPD tidak menunjukkan perbedaan antara program dan kegiatan serta sub kegiatan. Hanya ada perbedaan pada penetapan pagu indikatif dan kebutuhan awal Dinas Kesehatan.

Tabel 2.4
Review terhadap rancangan RKPD tahun 2022
Provinsi Jawa Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)**	**TARGET**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
DINAS KESEHATAN					**1.722.325.555.673**	**DINAS KESEHATAN**					
I	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan**	**91 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan**	**91 %**		
	1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27 Kab Kota		1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	27 Kab Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**2. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak**	**83 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**		**2. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular**	**83 %**		

			Menular			**MASYARAKAT**					
	2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota		2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**3. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**3. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan**	**100 %**		
	3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab / Kota		3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 kab/kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		**4. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**		**4. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa**			

	MASYARAKAT		**Luar Biasa Provinsi**			**DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Provinsi**			
	4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	7 buah		4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	7 buah		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**5. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**5. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar**	**100 %**		
	5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / Kota		5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**6. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**		**6. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional**			

						MASYARAKAT					
	6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / kota		6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab / kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**7. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi**	**80 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**7. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi**	**80 %**		
	7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7. Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS		7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7. Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**8. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)**	**95 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**8. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)**	**95 %**		
	8. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah		8. Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan	25 Dokumen		8. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP		8. Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah	25 Dokumen		

	Provinsi		jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%			Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**9. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**9. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat**	**100 %**		
	9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Kab / Kota		9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**10. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upya kesehatan promotif dan preventif**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**10. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upya kesehatan promotif dan preventif**	**100 %**		
	10. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab / Kota		10. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM		10. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab / Kota		

						Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**11. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**11. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi**	**100 %**		
	11. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		11. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**12. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi**	**80,19**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**12. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi**	**80,19**		
	12. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		12. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	27 Kab / Kota		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan		1,338,658,244	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu		1,338,658,244	

			Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					dan Anak			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		515860000	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif**		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		515860000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		1.222.273.239	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		1.222.273.239	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan STBM dan PKAM			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan STBM dan PKAM			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Kabupaten/Kota yang TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) nya dilakukan pembinaan dalam rangka pengawasan higiene sanitasi pengelolaan kesehatan haji			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji**		Jumlah Kabupaten/Kota yang TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) nya dilakukan pembinaan dalam rangka pengawasan higiene sanitasi pengelolaan kesehatan haji			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakar di			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**		Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakar di wilayah kerjanya			

			wilayah kerjanya								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Kab/Kota yang mencapai target upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**		Jumlah Kab/Kota yang mencapai target upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinkes Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan ODGJ sesuai standar			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinkes Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan ODGJ sesuai standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Jumlah Kabupaten kota yang mempunyai rehabilitasi medis napza			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA**		Jumlah Kabupaten kota yang mempunyai rehabilitasi medis napza			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Jumlah rekomendasi berupa data informasi identifikasi kebutuhan hasil Rapid Health Assesment			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana**		Jumlah rekomendasi berupa data informasi identifikasi kebutuhan hasil Rapid Health Assesment			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		Jumlah Kab/Kota melaporkan data			**Pengelolaan Pelayanan**		Jumlah Kab/Kota melaporkan data Penduduk			

	bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			**Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**		pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Discarded rate Campak dalam upaya Eliminasi Campak			**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Discarded rate Campak dalam upaya Eliminasi Campak			
			Jumlah Kab/Kota mencapai target AFP rate 2/100.000 anak usia < 15 tahun					Jumlah Kab/Kota mencapai target AFP rate 2/100.000 anak usia < 15 tahun Jumlah Respon Alert SKDR			
			Jumlah Respon Alert SKDR								
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang terkait puskesmas sesuai standar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas			**Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan**		Jumlah Kab/Kota yang terkait puskesmas sesuai standar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**		Jumlah Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional			
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan			**Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan			

			Pendampingan					dan Pendampingan			
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kab/Kota yang capaian kepesertaannya lebih dari 75%			**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**		Jumlah Kab/Kota yang capaian kepesertaannya lebih dari 75%			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		**Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat**			**Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)**		**Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		**Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan**			**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		**Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%**			**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**		**Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%**			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**13. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas**	**90 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**		**13. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas**	**90 %**		

						MASYARAKAT					
			14. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	85 %				**14. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)**	85 %		
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan	25 Kab / Kota	**2,303,359,265,303**	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:		1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan	25 Kab / Kota	**2,303,359,265 ,303**	
	1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program			1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program			
	2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		Jumlah Dokumen Pengembangan Software / Aplikasi yang digunakan yang telah dilakukan Maintenance Sesuai Kebutuhan data			2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		Jumlah Dokumen Pengembangan Software / Aplikasi yang digunakan yang telah dilakukan Maintenance Sesuai Kebutuhan data			

	3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan		Jumlah Dokumen Ketersediaan Alat Pemeriksaan Gula darah dan Kolesterol untuk Deteksi dini Faktor risiko PTM pada ASN di provinsi Jawa Barat			3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan		Jumlah Dokumen Ketersediaan Alat Pemeriksaan Gula darah dan Kolesterol untuk Deteksi dini Faktor risiko PTM pada ASN di provinsi Jawa Barat			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**15. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas**	**92 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**15. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas**	**92 %**		
	2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	25 Kab / Kota		2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	25 Kab / Kota		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**16. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat**	**100 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**16. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat**	**100 %**		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara	1 sistem		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 sistem		

			Terintegrasi			Secara Terintegrasi					
	1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Penguatan Sistem Pencatatan Data Rutin Program			1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Penguatan Sistem Pencatatan Data Rutin Program			
			17. Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	**60 %**				**17. Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi**	**60 %**		
			18. Persentasi Rumah Sakit Terakreditasi	**90 %**				**18. Persentasi Rumah Sakit Terakreditasi**	**90 %**		
			19. Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	**90 %**				**19. Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi**	**90 %**		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	23 kab / kota		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	23 kab / kota		
II	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan**			

	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	14 Kab / Kota		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	14 Kab / Kota		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	14 Kab / Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	14 Kab / Kota		
III	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**1. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) "**	**88 %**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**1. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) "**	**88 %**		
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)			

	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	**50**		Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	**50**		
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas**	**100 %**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas**	**100 %**		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab Kota		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab Kota		
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab		
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86,60**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**		**1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86,60**		

	DAERAH					**AN DAERAH**					
			2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	**100 %**				**2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		
			3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	**100 %**				**3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi**	**100 %**		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 Dokumen		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 Dokumen		
	Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	4 laporan		Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	4 laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa		Jumlah waktu	12 bulan		Penyediaan Jasa		Jumlah waktu pelaksanaan	12 bulan		

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS AL-IHSAN))		**1. PERSENTASE BOR**	**85**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS AL-IHSAN))**		**1. PERSENTASE BOR**	**85**		
			2. NET DEATH RATE PERMIL	**< 25‰**				**2. NET DEATH RATE PERMIL**	**< 25‰**		
			3. WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	**< 5**				**3. WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**	**< 5**		
			4. PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	**4,7 ‰**				**4. PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**	**4,7 ‰**		
			5. GROSS DEATH RATE PERMIL	**<45‰**				**5. GROSS DEATH RATE PERMIL**	**<45‰**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	470942 pasien		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	470942 pasien		

						Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**1. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**1. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	Rp. 387,354,559,827		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	Rp. 387,354,559,827		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS JIWA)		**PERSENTASE BOR**	**56**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**		**PERSENTASE BOR**	**56**		

						MASYARAKAT (RS JIWA)					
			NET DEATH RATE PERMIL	**0**				**NET DEATH RATE PERMIL**	**0**		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	**< 5**				**WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**	**< 5**		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	**0**				**PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**	**0**		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	**0**				**GROSS DEATH RATE PERMIL**	**0**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51486		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12		

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	1		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**100 %**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**100 %**		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	**100**				**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100**		
			Persentase ASN yang memiliki	**100**				**Persentase ASN yang memiliki kesesuaian**	**100**		

			kesesuaian kompetensi					**kompetensi**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	33 Laporan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	33 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**14 Laporan**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**14 Laporan**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	27,654,840,642		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	27,654,840,642		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS		**PERSENTASE BOR**	**35**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**		**PERSENTASE BOR**	**35**		

	PARU)					**MASYARAKAT (RS PARU)**					
			NET DEATH RATE PERMIL	**≤ 0,24 %**				**NET DEATH RATE PERMIL**	**≤ 0,24 %**		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	**≤ 5**				**WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**	**≤ 5**		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	**≤ 1,5 %**				**PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**	**≤ 1,5 %**		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	**45/1000**				**GROSS DEATH RATE PERMIL**	**45/1000**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		Jumlah Pasien TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 pasien		

						Provinsi					
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					
						Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas**	**92.6 %**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas**	**92.6 %**		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penderita TB hasil Jejaring eksternal TB di wilayah Kerja RS Paru	500 pasien		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penderita TB hasil Jejaring eksternal TB di wilayah Kerja RS Paru	500 pasien		
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya	13230 pasien		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam		Jumlah Pengunjung yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS dan Kampanye	13230 pasien		

			pembinaan PHBS dan Kampanye Kesehatan di berbagai media			rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Kesehatan di berbagai media			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	**100**				**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100**		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	**100**				**Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi**	**100**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	8 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	8 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			Administrasi Umum Perangkat		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			

						Daerah					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD			Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS Jampangkulon)		**PERSENTASE BOR**	**70%**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RS Jampangkulon)**		**PERSENTASE BOR**	**70%**		
			NET DEATH RATE PERMIL	**14‰**				**NET DEATH RATE PERMIL**	**14‰**		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	**5**				**WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**	**5**		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	**0.01%**				**PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**	**0.01%**		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	**20‰**				**GROSS DEATH RATE PERMIL**	**20‰**		

	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219 pasien		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219 pasien		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43219		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**75 %**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**75 %**		
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 org		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 org		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	95 orang		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar			

						Kesehatan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RS Jampangkulon)		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 persen**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RS Jampangkulon)**		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	55,000,000,000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pendapatan Pelayanan BLUD	55,000,000,000		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSKK)		**PERSENTASE BOR**	**75%**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**		**PERSENTASE BOR**	**75%**		

						KESEHATAN MASYARAKAT (RSKK)					
			NET DEATH RATE PERMIL	**5**				**NET DEATH RATE PERMIL**	**5**		
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD	**3**				**WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**	**3**		
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL	**9%**				**PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**	**9%**		
			GROSS DEATH RATE PERMIL	**14**				**GROSS DEATH RATE PERMIL**	**14**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4455		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANN		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**85,71**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANN**		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**85,71**		
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai	365		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	365		

	dan UKP Provinsi		standar			Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	30		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	30		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		

	Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	41,760,000,000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	41,760,000,000		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pameungpeuk)		**PERSENTASE BOR**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Pameungpeuk)**		**PERSENTASE BOR**			
			NET DEATH RATE PERMIL					**NET DEATH RATE PERMIL**			
			WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD					**WAKTU RESPON TIME RATE DI IGD**			
			PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL					**PERSENTASE PASIEN YANG DIRAWAT TERKENA INFEKSI NOSOKOMIAL**			
			GROSS DEATH RATE PERMIL					**GROSS DEATH RATE PERMIL**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12000		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara	2 aplikasi		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2 aplikasi		

			Terintegrasi			Secara Terintegrasi					
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**30 %**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis**	**30 %**		
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	80		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**	**86.60**		
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	**100**				**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100**		

			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	**100**				**Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi**	**100**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 bulan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 bulan		

	Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (LABKES)		**Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan**	**74 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (LABKES)**		**Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan**	**74 %**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung yang mendapatkan Pemeriksaan Laboratorium	23.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		

			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan**	**50 %**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**		**Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah**	**50 %**		

	(UPELKES)		**Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan**			**KESEHATAN MASYARAKAT (UPELKES)**		**dapat difungsikan**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana upaya peningkatan kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana upaya peningkatan kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar**	**9.3**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standard**	**9.3**		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	6690		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meningkat kapasitasnya sesuai standar	6690		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**100 %**		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian	**100 %**				**Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi**	**100 %**		

			kompetensi								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Pneunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Pneunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down* dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Selain itu, usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan kesehatan seperti PMI, Komisi penanggulangan AIDS, Rumah Sakit vertikal maupun swasta di Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2022
Melalui RKPD Jabaronline

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	11 Kegiatan Bantuan Hibah untuk Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat	1 paket	595.705.000	
2	Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat	Dinas Kesehatan	19 Kegiatan Bantuan Hibah untuk Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat	1 Paket		
3	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan HM. Syarifudin No. 50 Kp. Pilar 1 RT 001 RW 006, Kota Bogor	Perkumpulan PEKA merupakan salah satu lembaga yang selain rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Napza, juga merupakan lembaga yang melayani dan memberikan dampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS. Dan kami membutuhkan dukungan operasional guna	1 Paket		

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			memberikan layanan yang maksimal dan menyeluruh bagi ODHA yang ada di Kota dan Kab Bogor			
4	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Gg. Iman I No.66, Kota Bandung	Mencegah Terjadinya Penyebaran HIV dan AIDS	1 Paket		
5	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan Dr. Ir. Sukarno no. 1 Kota Bandung, Kota Bandung	Penanggulangan HIV AIDS KPA Provinsi Jawa Barat	1 Paket		
6	#HB Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan, Kab. Kuningan	Epidemi HIV/AIDS di Wilayah Kabupaten Kuningan terus meningkat menjadi peringkat ke-20 di Propinsi Jawa Barat, Terbatasnya sarana dan prasarana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kuningan dalam menjalankan peran dan fungsinya yang mengakibatkan KPA Kabupaten Kuningan belum berfungsi secara optimal selaku Lembaga Non Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi permasalahan HIV/AIDS	1 Paket		

Sebagai tindak lanjut Musrenbang wilayah maupun Musrenbang Provinsi, maka Kabupaten/Kota Mengusulkan kegiatan bantuan keuangan kepada Provinsi. Berikut usulan Kabupaten/Kota yang masuk melalui sistem RKPD Jabaronline yang terkait dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Tahun 2022 Melalui RKPD Jabaronline

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
1	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Margonda Raya No. 54 Dinas Kesehatan Kota Depok, Kota Depok	94.348.800.000	Kota Depok
2	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi	95.829.168.960	Kota Bekasi
3	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jalan Kesehatan Nomor 77 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka, Kab. Majalengka	19.000.000.000	Kab. Majalengka
4	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD LINGGAJATI	30.000.000.000	Kab Kuningan
5	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Garut, Kab. Garut	26.308.800.000	Kab Garut
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD 45 KUNINGAN	1.147.538.750	Kab Kuningan
7	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab Bogor	1.147.538.750	Kab Bogor
8	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan - Jl. Aruji Kartawinata No.21, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511, Kab. Kuningan	15.422.400.000	Kab Kuningan
9	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD LINGGAJATI	24.804.000.000	Kab Sukabumi
10	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Jl. Mt. Haryono. No.9, Kab. Indramayu	54.432.000.000	Kab Indramayu
11	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Non Rujukan Regional Cibingbin, Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan	12.000.000.000	Kab Kuningan
12	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab Karawang	18.293.688.000	Kab Karawang
13	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jl. Letjen Suprapto No. 103, Kab. Subang	27.216.000.000	Kab Subang
14	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Veteran No 60 Purwakarta, Kab. Purwakarta	27.419.938.560	Kab Purwakarta

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
15	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jl. W.R. Supratman No.73, Kota Bandung	112.024.866.240	Kota Bandung
16	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jl. Pahlawan No.25, Muktisari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat 46343, Kota Banjar	15.000.000.000	Kota Banjar
17	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kota Cimahi, Kota Cimahi	15.000.000.000	Kota Cimahi
18	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	13.789.440.000	Kab Bandung Barat
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Bandung Barat, Kab. Bandung Barat	500.965.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	Peningkatan Puskesmas	Kecamatan Ciamis, Kab. Ciamis	35.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Ciamis, Kab. Ciamis	20.923.660.800	Dinas Kesehatan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jalan Veteran No 60 Purwakarta, Kab. Purwakarta	257.250.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	kabupaten majalengka, Kab. Majalengka	14.515.200.000	Dinas Kesehatan
24	Peningkatan Puskesmas	Jalan Raya Plered Sindangsari Kecamatan Plered Purwakarta, Kab. Purwakarta	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
25	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jalan Raya Sindangsari Kecamatan Plered Purwakarta, Kab. Purwakarta	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Kiarapedes Purwakarta, Kab. Purwakarta	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
27	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya	22.376.450.880	Dinas Kesehatan Kab Tasik
28	Peningkatan Puskesmas	Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya	22.376.450.880	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kec. Cikatomas, Kec. Salopa, Kec. Jatiwaras, Kec. Jamanis, Kec. Sukaresik, Kec. Sukahening, Kec. Puspahiang, Kec. Ciawi, Kec. Cikatomas, Kec. Culamega, Kec. Cigalontang, Kec. Bojongasih, Kab. Tasikmalaya	524.475.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Puskesmas Cilengkrang, Cinunuk, dan Santosa, Kab. Bandung	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	62 puskesmas, 70 tempat kerja, 130 desa, Kab. Bandung	1.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Wilayah Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	37.987.548.480	Dinas Kesehatan
33	Peningkatan Puskesmas	Kec.Pagerageung, Kab. Tasikmalaya	2.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Cicalengka, Kab. Bandung	13.855.693.212	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Kota Cirebon	19.459.077.120	Dinas Kesehatan
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Kota Cirebon	1.912.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
				Daerah
37	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kabupaten Bekasi, Kab. Bekasi	137.325.404.160	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
38	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	40.286.030.400	Dinas Kesehatan
39	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Surya Kencana No. 45 Kelurahan Selabatu, Kota Sukabumi	7.783.957.440	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
40	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	17.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
41	#BK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Sukabumi (Daera Intervensi Stunting), Kab. Sukabumi	1.640.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Kapten Jamhur No.34, Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46321, Kota Banjar	6.713.280.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
43	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kota Bandung	25.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
44	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Sunan Muria No 6 Komplek Perkantoran di Sumber Kab Cirebon, Kab. Cirebon	62.707.478.400	Dinas Kesehatan
45	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jln. Kutamaya No 21 Kel Kota Kulon Kec Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20.063.272.320	Dinas Kesehatan
46	#BK Peningkatan Puskesmas	Jln Rd Umar Wirahadikusumah Km 18 Desa Situmekar Kec Cisitu, Kab. Sumedang		Dinas Kesehatan
47	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jln. Kutamaya No 21 Keluraha Kota Kulon Kec Sumedang Utara, Kab. Sumedang	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
48	#BK Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Jl. Dr. Sumeru No.120 Bogor, Kota Bogor	255.259.279.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
				Aset Daerah
49	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jalan Kesehatan Bogor, Kota Bogor	36.288.000.000	Dinas Kesehatan
50	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	20.861.517.600	Dinas Kesehatan
51	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan Ibu dan Anak Di Puskesmas, Kab. Pangandaran	4.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
52	#BK Peningkatan Puskesmas	Peningkatan Gedung Puskesmas di Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cibingbin, Kab. Kuningan	3.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
53	#BK Peningkatan Puskesmas	Pengadaan Instalasi Gas Medis Oksigen dan Vacuum di puskesmas, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
54	#BK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Pasawahan, Cigandamekar dan Lebakwangi, Kab. Kuningan	500.000.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
55	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Jadikarya Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
56	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Selasari, Kecamatan parigi, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
57	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
58	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Insfrastruktur Puskesmas Cijulang, Kab. Pangandaran	1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
59	#BK Peningkatan Puskesmas	Pembangunan Ruangan Puskesmas Langkaplancar, Kab. Pangandaran	5.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kegiatan	Lokasi	Usulan Awal	Pengusul
60	#BK Peningkatan Puskesmas	Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem, Kab. Subang	2.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
61	#BK Peningkatan Puskesmas	Desa Jatireja Kecamatan Compreng, Kab. Subang	2.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
62	#BK Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jl. Prof. Moch Yamien No. 8 (Kantor Dinas Kesehatan), Kab. Cianjur	35.081.424.000	Dinas Kesehatan
63	#BK Peningkatan Puskesmas	Cisayong, Kab. Tasikmalaya	2.500.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
64	#BK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67 Puskesmas di Kabupaten Garut, Kab. Garut	1.410.380.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient* yang efektif bagi balita, anak

usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyaraka madani, *perguruan* tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.

3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan *real time surveilans* dan pengendalian vektor; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk

mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan kesehatan (*Health in All Policies*).

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)

b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re- distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; serta pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;

e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk *big data* untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator kinerja). Adapun tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Pada Renstra awal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Dinas Kesehatan telah merumuskan Tujuan Jangka Menengah Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu "Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat" dengan 13 indikator sebagai berikut :

1. Ratio kematian ibu
2. Ratio kematian bayi
3. Prevalensi stunting
4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)
5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60%
6. Persentase keberhasilan pengobatan TB
7. Prevalensi hipertensi
8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan
9. Persentase puskesmas yang terakreditasi
10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat
11. Persentase rumah sakit terakreditasi
12. Persentase ketersediaan obat esensial
13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, yaitu: "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Rasio kematian Ibu;
2. Ratio kematian bayi
3. Prevalensi stunting
4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)
5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60%
6. Persentase keberhasilan pengobatan TB
7. Prevalensi hipertensi
8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan
9. Persentase puskesmas yang terakreditasi
10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat
11. Persentase rumah sakit terakreditasi
12. Persentase ketersediaan obat esensial
13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage

Namun, seiring dengan adanya perubahan di dalam kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan dan dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 dan 2021 serta disesuaikan dengan kewenangan dan tupoksi, Dinas Kesehatan merumuskan kembali tujuan jangka menengah yang akan dikawal sampai dengan tahun terakhir periode Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh"

Dengan sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing
2. Menurunnya kasus Stunting di Provinsi Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector.

Ketercapaian Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ini akan diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh system Kesehatan daerah yang tangguh	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/Kota	N/A	66,36	67,63	68,92	70,58
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD	N/A	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26-83,75
			Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	2	2	3	3	4
		Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor	Prevalensi stunting	27,2%	25,2%	23,2%	21,2%	19,2%

Definisi operasional dari setiap IKU Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/kota	Persentase pelayanan SPM Kesehatan yang dilakukan di puskesmas	Capaian indicator SPM Kesehatan di puskesmas di 27 kab/kota dibagi jumlah SPM dikali 100	Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	IKM = total nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi x nilai penimbang	UPTD/BPS
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna	Rumah sakit milik provinsi yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna sebagai pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit	15 bab yang disurvei mendapatkan minimal nilai 80%	RS milik Provinsi
Prevalensi Stunting	Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya berdasarkan indeks	Jumlah balita pendek/jumlah balita yang diukur Panjang atau tinggi badan dikali 100	BPS

	panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari 2 SD.		

Perubahan tujuan, sasaran, dan indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka mendukung sasaran dan indikator pembangunan Kesehatan daerah dimana akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing diharapkan fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya milik pemerintah dapat menampilkan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang selama ini sebagian besar masih dipandang berada di bawah performa fasilitas kesehatan milik swasta atau perorangan. Khusus bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi didorong untuk mencapai strata akreditasi tertinggi yaitu akreditasi paripurna sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, UPTD yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dapat menerapkan manajemen pengelolaan keuangan yang lebih mandiri melalui BLUD.

Penyesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan langkah mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Reformasi Sistem Kesehatan Daerah yang mengarahkan program kepada penguatan upaya kesehatan melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diantaranya pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit termasuk penyediaan pusat isolasi COVID-19; peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% *Universal Health Coverage* (UHC) melalui pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin; serta penguatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M, dan yang penting lainnya adalah penyediaan sumberdaya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar.

Berikut sandingan tujuan, sasaran, dan indikator Renstra dan Renstra Perubahan :

Isi	Lama	Perubahan
Tujuan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh

Isi	Lama	Perubahan
Indikator	1. Ratio kematian ibu 2. Ratio kematian bayi 3. Prevalensi stunting 4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) 5. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60% 6. Persentase keberhasilan pengobatan TB 7. Prevalensi hipertensi 8. Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan 9. Persentase puskesmas yang terakreditasi 10. Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat 11. Persentase rumah sakit terakreditasi 12. Persentase ketersediaan obat esensial 13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage	Angka Harapan Hidup
Sasaran	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing 2. Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector
Indikator sasaran	1. Menurunnya Kematian Ibu; 2. ratio kematian bayi 3. prevalensi stunting 4. persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) 5. persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60% 6. persentase keberhasilan pengobatan TB 7. prevalensi hipertensi 8. persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan 9. persentase puskesmas yang terakreditasi 10. persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat 11. persentase rumah sakit	1. Persentase pelayanan SPM di kab/kota 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD 3. Jumlah Rumah Sakit Provinsi yang Terakreditasi Paripurna 4. Prevalensi Stunting

Isi	Lama	Perubahan
	terakreditasi 12. persentase ketersediaan obat esensial 13. persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage	

Selanjutnya rangkaian prioritas pembangunan bidang kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 akan diterjemahkan ke dalam arahan program-program Dinas Kesehatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh bidang dan UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat arahan program prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan program dan kegiatan, yaitu melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui :

1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tatakelola kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik;
3. Pemenuhan kebutuhan rumah sakit termasuk penyediaan pusat isolasi Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan;
4. Peningkatan kompetensi, ketersediaan, dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;
5. Peningkatan penggunaan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu di berbagai tingkat sistem kesehatan baik secara teratur maupun dalam keadaan darurat;
6. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin, dan teknologi;
7. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100 persen *Universal Health Coverage* (UHC)
8. Optimalisasi strategi promotif dan preventif seperti digitalisasi 3T dan 5 M.

Untuk menterjemahkan lebih lanjut arahan program prioritas di atas telah dirumuskan indikasi prioritas kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan dalam merumuskan kegiatan dan sub kegiatan untuk 2 (dua) tahun ke depan, yaitu :

1. Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta;
2. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pekerja tertentu yang belum memiliki BPJS kesehatan;
3. Penyediaan produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan;
4. Pembangunan dan peningkatan Puskesmas dan Rumah Sakit;
5. Pemenuhan sarana prasarana, SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, dan bahan habis pakai, serta akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit;
6. Pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan;

7. Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil;
8. Integrasi sistem kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
9. Penguatan promosi kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
10. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, melalui pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi, sistem informasi manajemen 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas;
11. Penyediaan vaksin COVID-19; pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi hasil vaksinasi dimana pelaksanaannya akan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta melibatkan pemangku kepentingan agar efektif dan efisien;
12. Sosialisasi berkelanjutan mengenai keamanan vaksin;
13. Pengendalian penularan dan peningkatan kasus sekaligus pengendalian pencemaran limbah medis akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 ;
14. Kajian pembangunan rumah sakit rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan, serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19;
15. Pusat isolasi mandiri COVID-19 di tingkat desa/kelurahan
16. Penguatan regulasi Kesehatan

Selain arahan program prioritas dan kegiatan prioritas di atas, ada beberapa indikasi program dan kegiatan pada wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan, dan wilayah perbatasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, diantaranya :

a. Wilayah Pengembangan : penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
b. Pusat-Pusat Kegiatan :
   - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKN yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe A;
   - Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKW yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe B; dan
   - Pemenuhan sarana prasarana minimal di PKL yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe C dan pembangunan puskesmas PONED
c. Wilayah Perbatasan :
   - Kerjasama dalam pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten
   - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten
   - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Barat-Banten

Dalam merencanakan program dan kegiatan urusan kesehatan, sesuai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi yaitu meningkatkan derajat kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan daerah yang tangguh, maka perlu dilakukan pula identifikasi program dan kegiatan yang dapat mengakselerasi terwujudnya sistem reformasi kesehatan daerah yang tangguh melalui :

a. Upaya kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
   - Pembangunan dan pengembangan rumah sakit dan puskesmas
   - Penyediaan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar
   - Pemerataan fasilitas kesehatan tingkat rujukan
   - Percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui penguatan sarana, prasarana, dan SDM terlatih dalam persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
   - Perluasan intervensi spesifik dan penguatan intervensi sensistif yang terintegrasi
   - Penguapan upaya konvergensi multisektor
   - Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
   - Penguatan surveilans yang terintegrasi dan real-time
   - Adaptasi kebiasaan baru penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Jawa Barat
   - Pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas di Jawa Barat termasuk pengembangan fasilitas kesehatan di Kawasan metropolitan rebana dan wilayah perbatasan.
   - Pengeloaan BLUD yang baik
b. Pembiayaan kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
   - Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
   - Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan
   - Memperluas akses dan jejaring pembiayaan kesehatan
c. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
   - Peningkatan kompetensi, ketersediaan, dan distribusi sumberdaya manusia kesehatan yang ideal melalui pelatihan, pembiayaan pendidikan, dan insentif tenaga kesehatan
   - Penguatan Upelkes sebagai "*Corporate University*"
d. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
   - Penyediaan produk-produk farmasi yang penting dan aman
   - Penyediaan vaksin yang memadai
   - Penyediaan teknologi kesehatan untuk pelayanan kesehatan
   - Penguatan penatalaksanaan sediaan farmasi
   - Pengadaan alat kesehatan
   - Pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman berbahaya
e. Pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi kesehatan yang tangguh, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:,
   - Penguatan integrasi sistem kesehatan antara pusat dan daerah
   - Pengadaan Regulasi manajemen system informasi kesehatan provinsi
   - Review regulasi dan kebijakan kesehatan
f. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dengan beberapa indikasi program dan kegiatan berikut:
   - Penguatan/pengembangan jejaring kolaborasi dan kerjasama dalam upaya promotif dan preventif

- Pengembangan media dan digitalisasi promosi kesehatan
- Penguatan pengembangan dan penelitian kesehatan

Berdasarkan arahan program dan kegiatan prioritas serta memperhatikan arahan pada RTRW dan wilayah perbatasan di atas, maka dirumuskan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Selain itu, indikator program mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga mengutamakan penggunaan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) output dan outcome sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut :

I. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, dengan sasaran program adalah meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
      1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
      2) Pengeloalaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
      3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
      4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
      5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
      6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
      7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
      8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
      9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
      10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
      11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
15) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
17) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
18) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
20) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
21) Pengelolaan Penelitian Kesehatan
22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
23) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
24) Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
25) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
26) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
27) Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
28) Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas

b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :

1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
4) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
6) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7) Pengembangan Rumah Sakit
8) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
9) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya
10) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
11) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
12) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
13) Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
14) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
15) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
16) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

17) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
18) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
19) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
21) Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
22) Pemeliharaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan Sub Kegiatan :
1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
3) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

II. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,** dengan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:
a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, dengan sub kegiatan:
1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

III. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**, dengan sasaran program adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:
a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dengan sub kegiatan:
1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan sub kegiatan:

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
2) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik

IV. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,** dengan sasaran program adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
   1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
   1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
   1) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

V. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sasaran program adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
   1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   7) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
6) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
7) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4) Pengadaan Mebel
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator, target kinerja, dan kerangka pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tersedia pada tabel terlampir.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen	100	**715.224.436.763**	100		100		100		**Dinas Kesehatan**
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	Persen	100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum	Persen	100		100		100		100		
				Persentase Penyediaan Sarana. Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100		100		100		100		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas dan Akuntabel	Dokumen	12	**2.644.353.810**				**3.476.065.494**		**3.476.065.494**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen	1	1.877.606.760		2.683.663.766	1	2.483.134.940	1	2.483.134.940	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran	Dokumen	1				1		1		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	Dokumen	1				1		1		
				Jumlah Dokumen Rancangan Awal Program dan Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen	1				1		1		
				Jumlah Dokumen Renja	Dokumen	1				1		1		
				Jumlah Dokumen Renstra	Dokumen	1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Kegiatan Background Study Peran Dinas Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat	Dokumen									
				Jumlah Dokumen Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen			1						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Review Renstra RS Kesehatan Kerja	Dokumen	1	249.977.012	-	100.000.000		110.000.000		110.000.000	**RSKK**
				Penyusunan DPA				1						
				Penyusunan DPA Pergeseran				1						
				Penyusunan DPA Perubahan				1						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyusunan RKA				1						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1	246.278.941	-	200.000.000		500.000.000		500.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah Laporan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen			33		33		33		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen PRA RKA, RKA RS Paru	Dokumen	2	53.577.500	3	150.000.000	3	165.000.000	3	165.000.000	**RS PARU**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah pertemuan rapat koordinasi perencanaan	Pertemuan			2	246.493.000	2	246.493.000	2	246.493.000	**AL IHSAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		38.137.800	1	359.959.000		50.437.241		50.437.241	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA	dokumen	1	-	-	-					**RSUD JAMPANG**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	-	-					**RS JIWA**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen SPJ3, Laporan Keuangan Tahunan RS Paru	Laporan		35.330.000	4	100.000.000					**RS PARU**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan			15.948.900		-		-		-	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	-	-					**RS JIWA**
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen		30.976.900	1	13.276.825		40.966.950		40.966.950	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	koordinasi dan Penyusunan DPA	dokumen	1	-	-	-					**RSUD JAMPANG**
				Koordinasi dan Penyusunan RKA	dokumen	1		-						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-	-	-					**RS JIWA**
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	Dokumen		16.550.600	1	9.742.370		21.888.169		21.888.169	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	koordinasi dan Penyusunan DPA	dokumen	1	-	-	-					**RSUD JAMPANG**
				koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA	dokumen	1		-						
				Koordinasi dan Penyusunan RKA	dokumen	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				-	-	-					**RS JIWA**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen	1	514.200.000		440.832.000		680.029.500		680.029.500	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan/Dokumen			1		12		12		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	4	150.932.850		40.860.052		199.608.694		199.608.694	
				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Dokumen			1		4		4		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Triwulan 1-4	Dokumen	4	99.590.400	-	-					**RSKK**
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan RS Paru	Kegiatan	1	54.718.250	-	-					**RS PARU**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**609.037.901.696**				**637.958.987.658**		**637.958.987.658**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	1	608.652.048.214	1	574.449.367.352	1	608.652.048.214	1	608.652.048.214	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan					4		4		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				26.753.482		26.753.482		45.000.000		45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Laporan			1		4		4		
				Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum di Dinas Kesehatan	Unit Kerja					13		13		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jenis	22	62.641.163		75.169.396		82.686.336		82.686.336	**UPELKES**
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Administrasi Keuangan	Jenis			22		22		22		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur Administrasi Keuangan	OK			60		69		69		
				Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	OK			24		24		24		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jasa Konsultan Pelaporan Keuangan BLUD	Dokumen	1	200.000.000	1	250.000.000		275.000.000		275.000.000	**RSKK**
				Jumlah Pelaporan Keuangan Tahunan	Dokumen					1		1		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen SPJ3, laporan keuangan tahunan RS Paru	Dokumen /Laporan	1	108.780.000	4	100.000.000	4	119.658.000	4	119.658.000	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen /Laporan	1	312.300.000	1	312.300.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Laporan					4		4		
				Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum di Dinas Kesehatan	Unit Kerja					13		13		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	134.957.957		150.000.000		500.000.000		500.000.000	**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	Dokumen			14		14		14		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	12	46.800.000	1	46.800.000		53.820.000		53.820.000	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan					4		4		
				Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan					12		12		
				Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Keuangan dan Umum	Unit Kerja					13		13		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	12	100.000.000	-	-					**RSKK**
				Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2		-	-					
				Jumlah Laporan Keuangan Triwulan	Dokumen	2		-	-					
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Dokumen	1	-		-		-		-	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	50.000.000	-	-					**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel	Tahun		**4.049.676.760**	1			**6.276.591.029**		**6.276.591.029**	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Stel	500	-		1.284.119.029		1.284.119.029		1.284.119.029	
				Jumlah Pakaian Adat	Stel			300						
				Jumlah Pakaian Dinas Harian	Stel	300		300						
				Jumlah Pakaian Olahraga	Stel	300		300						
				Jumlah Pakaian Pramuka	Stel	300		300						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen			-	376.200.000	1	550.000.000	1	550.000.000	**LABKES**
				Pengadaan Pakaian Pramuka	Stel			50						
				Pengadaan Pakaian Adat	Stel			50						
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan batik	Stel	50	-	-	165.000.000		181.500.000		181.500.000	**UPELKES**
				Pengadaan Pakaian Adat	Stel			50		50		50		
				Pengadaan Pakaian Pramuka	Stel			50		50		50		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Honorarium Narasumber Kegiatan	Orang	130	2.197.901.760	100	2.992.472.000		2.992.472.000		2.992.472.000	
				Jumlah Honorarium Tenaga Teknis D3	Orang	7		7		7		7		
				Jumlah Honorarium Tenaga Teknis S1	Orang	13		13		13		13		
				Jumlah Honorarium Tenaga Teknis SLTA/ SMK	Orang	14		14		14		14		
				Jumlah Honorarium untuk Instruktur Olahraga	Bulan			12		12		12		
				Jumlah Honorarium untuk Instruktur Seni/ Vokal	Bulan			12		12		12		
				Jumlah Honorarium untuk Pembaca Doa	Orang	5		5		5		5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Honorarium untuk Penceramah/ Dai/Khatib	Orang	10		10		10		10		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	3.060.627.424		4.592.684.000	12	4.840.000.000	12	4.840.000.000	**LABKES**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Belanja Kontribusi, Bimtek, Sertifikassi	Orang	60	851.775.000	100	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	
				Jumlah Orang Mengikuti Diklat PIM	Orang	10		10		10		10		
				Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Penanaman Sikap Mental dan Jiwa Korsa	Orang			300		300		300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Orang Mengikuti Team Building Sekretariat	Orang			100		100		100		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam satu tahun UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan/ Orang	12	133.500.000	25	200.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	**LABKES**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan/Workshop/Bimtek dll	Orang	25	135.100.000		135.270.000	25	148.797.000	25	148.797.000	**UPELKES**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan untuk Pegawai	Orang	65	502.800.000	72	500.000.000	72		72		**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan Formal	Persen/ Orang	100	863.210.000	150	300.000.000	150	350.000.000	150	350.000.000	**RS PARU**
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Belanja Jasa Akomodasi	Kali	5	1.000.000.000	5	966.518.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	
				Jumlah Bulan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Bulan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Honorarium Narasumber	Kali/ Orang	4		33		33		33		
				Jumlah Makan dan Minum Rapat	Kali/ Orang	4		1000		1000		1000		
				Jumlah Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor	Kali			4		4		4		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	Kali			4		4		4		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				200.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berkualitas dan Akuntabel	Tahun		**27.874.536.188**	1			**21.000.000.000**		**21.000.000.000**	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	93	9.429.134.187				2.000.000.000		2.000.000.000	
				Jumlah Pegadaan Thermohygrometer	Unit	10								
				Jumlah Pengaadaan Toolskit Jaringan	Unit	3								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengadaan Alat Hygiene Diri	Galon	570								
				Jumlah Pengadaan Cendramata	Buah	200								
				Jumlah Pengadaan Handphone										
				Jumlah Pengadaan Lisensi Microsoft Office										
				Jumlah Pengadaan Lisensi Room Zoom Meeting	Unit	15								
				Jumlah Pengadaan Palet Plastik										
				Jumlah Pengadaan Perlengkapan CCTV										
				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Humas										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Podcast	Paket	1								
				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Teleconfrence	Unit	13								
				Jumlah Pengadaan Pompa										
				Jumlah Pengadaan Server Aplikasi										
				Jumlah Pengadaan Server Storage										
				Jumlah Pengadaan Thermal Kamera Scanner										
				Jumlah Pengadaan Thermometer Infrared										
				Jumlah Pengadan E-KTP Reader										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan/Dokumen			1		12		12		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan/ Jenis		830.107.375	44	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	**LABKES**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Administrasi Umum	Jenis	41	66.737.501	44	96.484.615	44	106.133.076	44	106.133.076	**uplekes**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat/Bahan Habis Pakai	Bulan	12	2.358.616.632	-	2.637.000.000		2.900.700.000		2.900.700.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis/ Bulan/ Persen	33		100		12	12			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat/Bahan Kantor Alat Listrik	Jenis	26	1.090.797.523	26	1.200.000.000	26	1.320.000.000	26	1.320.000.000	**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Alat/Bahan Komputer	Jenis	9		9		9		9		
				Penyediaan Alat Perkakas Bengkel	Jenis	9		9		9		9		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	48		48		48		48		
				Penyediaan Komputer	Unit	20		20		20		20		
				Penyediaan Laptop	Unit	5		5		5		5		
				Penyediaan Notebook				-						
				Penyediaan Peralatan Studio	Jenis	7		7		7		7		
				Penyediaan Printer	Unit	4		4		4		4		
				Penyediaan Tablet PC				-						
				Penyediaan Kursi Pegawai	Pcs					20		20		
				Penyediaan Kursi Tunggu Pasien	Pcs					55		55		
				Penyediaan Mesin Pemotong Kertas	Unit					3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Mesin Tik Elektronik	Unit					1		1		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Angkutan Roda TigaTenaga Listrik	Unit	2	488.298.965	-	9.684.279.116		10.000.000.000		10.000.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Bulan/ Dokumen			14		12		12		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan/ Jenis	12	47.716.250	10	299.983.200	10	400.000.000	10	400.000.000	**RS PARU**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Barang Pakai Habis		-	13.353.526.780	-	8.688.879.458	-	22.042.406.238	-	22.042.406.238	**AL IHSAN**
				Belanja Modal Alat Bantu Lainnya		-		-		-		-		
				Belanja Modal Alat Kantor		-		-		-		-		
				Belanja Modal Alat Komunikasi		-		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga		-		-		-		-		
				Belanja Modal Alat Studio		-		-		-		-		
				Belanja Modal Komputer		-		-		-		-		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			24		24		24		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Cetak Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	722.456.500				1.000.000.000		1.000.000.000	
				Jumlah Pengadaan Cetak	Tahun/ Dokumen			1		1		1		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	275.013.500		500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Administrasi Umum	Jenis	11	90.901.292	11	88.078.009	11	96.885.810	11	96.885.810	**UPELKES**
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Publikasi dan Dokumentasi	Jenis	6		4		4		4		
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Suvenir/Cenderamata	Jenis	3		3		3		3		
				Jumlah Penyediaan Fotocopy	Lembar	5000		5000		52000		52000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan	Kali	12	134.563.070	12	200.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	**RSKK**
				Penyediaan Penggandaan	Kali	12		12		12		12		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Fotocopy dan Jilid	Tahun	1	589.065.000		499.995.300		900.000.000		900.000.000	**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan/ Dokumen			14		12		12		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-	-	-					**RS PARU**
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy			45.320.000	-	49.000.000		94.320.000		94.320.000	**AL IHSAN**
				Jumlah cetakan dan penggandaan	Bulan			12		12		12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Belanja Jasa Akomodasi	Kali	2	17.722.945.501				18.000.000.000		18.000.000.000	
				Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Perjalanan DInas Dalam Daerah	Bulan/ Tahun	12				1		1		
				Jumlah Penyediaan Perjalanan DInas Luar Daerah	Bulan	12								
				Jumlah Perjalanana Dinas	Tahun					1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanana Dinas	Dokumen			1						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan/ Kali	12	837.031.840		5.400.000.000	1000	5.940.000.000	1000	5.940.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	OK	64	168.530.000			96	184.833.880	96	184.833.880	**UPELKES**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi RSUD Pameungpeuk	Orang/ Bulan	150	260.785.000	-	286.000.000	12	314.600.000	12	314.600.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Apararatur yang melakukan Kegiatan Dinas Luar	Orang/ Bulan			12						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mobilitas Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Aparatur dan Petugas Rumah Sakit	Bulan	12	1.200.000.000		1.320.000.000	12	1.320.000.000	12	1.320.000.000	**RSKK**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Apararatur yang melakukan Konsultasi dan koordinasi	Kali	596	1.689.730.000	596	1.600.000.000		1.870.000.000		1.870.000.000	**RSUD JAMPANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan					596		596		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Air Minum Galon	Tahun	1	1.668.206.500		844.975.000		2.000.000.000		2.000.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan			12		12		12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas bagi Karyawan RS Paru	Bulan	12	628.680.000	12	619.848.900	12	850.000.000	12	850.000.000	**RS PARU**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Negeri			292.650.000		353.507.000		646.157.000		646.157.000	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas	Bulan			12		12		12		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	29.987.980	12	40.000.000	12	44.000.000	12	44.000.000	**LABKES**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik Pakai Habis	Jenis	12	21.919.700	12	24.698.080	12	27.167.888	12	27.167.888	**UPELKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan			12	200.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	**LABKES**
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	Unit/ Bulan	20	728.142.952	20	916.552.097	12	991.993.307	12	991.993.307	**UPELKES**
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Kebersihan	Jenis	27		27		27		27		
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Kebersihan Kendaraan	Jenis	4		4		4		4		
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Laundry	Jenis	5		5		5		5		
				Jumlah Penyediaan Alat/Bahan Pencegahan Covid-19	Jenis	10		12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Waktu Isi Ulang Tabung Gas untuk Setrika Uap	Bulan	12		100		12		12		
				Jumlah Waktu Sewa Tanaman Hias	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Penyediaan Karangan Bunga	Buah			12		5		5		
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama	Set			5		100		100		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Jenis	33	160.270.200	33	175.000.000	33	192.500.000	33	192.500.000	**RSKK**
				Penyediaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Jenis	13		13		13		13		
				Penyediaan Isi Tabung Gas 12 KG	Tabung	6		6		6		6		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Kulkas	Unit			2		2		2		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Pengadaan mesin cuci	Unit	1	318.084.344		113.041.400		200.000.000		200.000.000	**RS PARU**
				2. Mesin cuci infeksius	Unit	2								
				3. Mesin pengering	Unit	2								
				4. Mesin setrika	Unit	1								
				5. trolly pengangkut makanan pasien	Unit	2								
				6. water level kontrol	Unit	1								
				7. water filter dan pemasangan	Set	1								
				8. blender	Unit	2								
				9. food processor	Unit	1								
				10. rice cocker 3 susun	Unit	1		3						
				11. magic com	Unit	1								
				12. kulkas besar	Unit	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				13. meja persiapan makan, dan meja timbangan.	Set	1								
				Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga RS Paru	Jenis					3		3		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Barang Pakai Habis		-	3.557.733.268	-	2.000.000.000	-	5.557.733.268	-	5.557.733.268	**AL IHSAN**
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga		-		-		-		-		
				Jumlah Peralatan rumah tangga	Jenis			8		8		8		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	320.000.000		1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	**LABKES**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur	OK	240	94.250.000	30	195.750.000	240	106.645.000	240	106.645.000	**UPELKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	OK	1000		240		1000		1000		
				Jumlah Waktu Penyediaan Air Minum Galon	Bulan	12		1000		12		12		
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	OK			12		30		30		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan Tamu	Bulan	12	200.250.000	12	270.000.000	12	314.600.000	12	314.600.000	**RS PAMEUNGPEUK**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minun untuk Tamu	Kegiatan/ Bulan	2	150.250.000	12	500.000.000		350.000.000		350.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah orang yang disediakan Makanan dan Minuman	Bulan					12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman rapat, tamu,DTT, kebutuhan air minum (galon)	Bulan	12	1.721.100.000	12	3.409.350.000	12	2.701.600.000	12	2.701.600.000	**RS PARU**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			251.400.000		200.000.000		451.400.000		451.400.000	**AL IHSAN**
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi					4609		4609		
				Jumlah makanan dan minuman untuk rapat koordinasi				4609						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku-Buku Kesehatan	Bulan	12	8.520.000	-	-					**RSKK**
				Langganan Surat Kabar/Majalah	Bulan	12		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12		-						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	**AL IHSAN**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	Tahun		**58.097.700.000**	1			**65.000.000.000**		**65.000.000.000**	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan	unit	5	-							
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil Kepala UPTD RSUD Kesehatan Kerja	Unit	1	450.000.000	1	-	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit			8	2.314.840.000					**RSUD JAMPANG**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Double Cabin	Unit	2	9.597.700.000							
				Jumlah Kendaraan Roda 2	unit	30								
				Jumlah Kendaraan Roda 4	unit	15								
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	1	-	-	1.630.940.000		1.650.000.000		1.650.000.000	**LABKES**
				2. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3		-		8		8		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			8						
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional, Kendaraan Ambulance	Unit			5	2.100.000.000	5	2.310.000.000	5	2.310.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Operasional Petugas Covid-19	Unit	1	850.000.000	-	-					**RSKK**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Ambulance Pasien Covid-19	Unit	1	568.700.000	-	-		2.800.000.000		2.800.000.000	**RSUD JAMPANG**
				Jumlah Kendaraan Dinas Dokter	Unit					8		8		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan	Bulan	12	48.500.000.000		60.658.000.000					
				Jumlah Unit Bangunan	Unit			1		1		1		
			Pengadaan Mebel	1. Jumlah Pengadaan Mebel UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Unit	22	38.206.000	80	500.061.542	80	550.000.000	80	550.000.000	**LABKES**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Lemari Peralatan Laboratorium Praktek Pelatihan	Buah	10	-		-					**UPELKES**
				Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	Buku					250		250		
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit					19		19		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Covid-19	Unit					1		1		
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	Set					4		4		
				Jumlah Pengadaan Sistem Informasi UPTD Pelatihan Kesehatan	Set					1		1		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Custom Gedung	Pekerjaan	1	825.900.205		1.548.949.595		1.320.000.000		1.320.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Mebel Ruang Pelayanan Kesehatan	Pekerjaan			1		1		1		
			Pengadaan Mebel	Kursi Tamu	buah	55	885.193.796	-	-					**RSKK**
				Tiang Antrian	Unit	20								
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	159	499.342.952	90	1.000.000.000	90	1.650.000.000	90	1.650.000.000	**RSUD JAMPANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Mebel	jumlah tersedianya mebel di lingkungan RSUD Al Ihsan	Jenis			20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	**AL IHSAN**
			Peningkatan Pelayanan BLUD				**31.440.000.000**				**50.112.000.000**		**50.112.000.000**	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan	12	31.440.000.000	12		12	50.112.000.000	12	50.112.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan	12	50.000.000.000	12	-	12	60.000.000.000	12	60.000.000.000	**RSUD JAMPANG**
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Makanan dan Minuman Pasien rawat inap	Bulan	12	30.000.000.000				68.000.000.000		68.000.000.000	**RS JIWA**
				2. Persentase kebutuhan obat pasien yang terpenuhi	Persen	100								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3. Bahan laboratorium	Bulan	12								
				4. Jumlah Makanan dan Minuman petugas Piket dan potensi resiko	Bulan	12								
				5. Terpenuhinya honor SDM BLUD	Bulan	12								
				6. Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telephone, dan internet serta kebutuhan rumah tangga	Bulan	12								
				7. Pakaian Dinas BLUD	Bulan	12								
				8. Jumlah Pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan	Persen	65								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				9. Jumlah petugas beresiko terpantau kesehatannya memalui MCU	Orang	100								
				10. Jumlah tenaga BLUD mendapatkan peningkatan Jiwa Korsa	Persen	100								
				11. Persediaan bahan Pemeliharaan gedung non gedung	Persen	100								
				12. Biaya Operasional Tenaga Blud untuk Jemput, Pemulangan dan pendampingan Pasung	Persen	75								
				13. Koordinasi dalam daerah	Bulan	12								
				14. Koordinasi Luar provinsi	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				15. Cetak dan penggandaan	Paket	1								
				16. Honoraium Pengadaan barang/ jasa	Bulan	12								
				17. Makanan dan minuman rapat	Paket	5								
				18. Vacum cleaner	Paket	1								
				Belanja operasional RS Jiwa	Bulan			12		12		12		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost Recovery	Persen	100	10.719.475.843	12	-		13.000.000.000		13.000.000.000	**RS PARU**
				Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Bulan					12		12		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan	12	325.870.657.133	12	-	12	380.000.000.000	12	380.000.000.000	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pengadaan Peralatan Studio	Paket	1	-		-					**UPELKES**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	34	856.143.200	19	739.502.500					**UPELKES**
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Covid-19	Unit			1						
				Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	Buku			250						
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit			19						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	Set			4						
				Jumlah Pengadaan Sistem Informasi UPTD Pelatihan Kesehatan	Set			1						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	Tahun		**8.786.797.351**	1			**6.000.000.000**		**6.000.000.000**	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Iuran Sampah Kantor	Bulan	12	2.865.316.400		3.524.911.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
				Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar/ Majalah	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Bulan Langganan Telepon	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Langganan TV kabel										
				Jumlah Bulann Langganan Air	Bulan	12								
				Jumlah Dokumentasi, dan Publikasi Kegiatan Kedinasan	Tahun	1								
				Jumlah Penyediaan Langganan Kantor	Tahun			1		1		1		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	2.996.460.000	12	2.484.840.000	12	3.080.000.000	12	3.080.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Hosting Website dan LMS	Bulan	12	823.586.820	12	822.336.000	12	1.062.604.778	12	1.062.604.778	**UPELKES**
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	Bulan	12		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Telepon	Bulan	12		12		12		12		
				Penyediaan Jasa Langganan TV Berbayar	Bulan			-		12		12		
				Penyediaan Jasa Video Conference (Zoom Meeting)	Bulan			-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Telepon	Bulan			12						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Langganan Air Bersih	Bulan	12	955.948.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	**RSKK**
				Penyediaan Langganan Internet	Bulan	12		12						
				Penyediaan Langganan Koran/Majalah	Bulan	12		12		12		12		
				Penyediaan Langganan Listrik	Bulan	12		12		12		12		
				Penyediaan Langganan Telepon	Bulan	12		12		12		12		
				Penyediaan Langganan TV Kabel	Bulan			-		12		12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1.429.762.592	12	2.200.000.000		2.420.000.000		2.420.000.000	**RSUD JAMPANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di RSUD Jampangkulon	Bulan					12		12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan sumber daya listrik	Bulan	12	777.497.200	12	1.083.800.000	12	935.000.000	12	935.000.000	**RS PARU**
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Gedung Olahraga	Kali/Tahun	48	276.000.000	1	358.800.000		500.000.000		500.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	1.069.954.175	12	500.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Kegiatan	4	264.391.672							**RS JIWA**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat kebersihan Kantor	Paket	1	5.645.480.951		7.539.125.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
				Jumlah Bulan Penyedotan Septic Tank	Bulan	12								
				Jumlah Pakaian Kerja Keamanan	Stel	25								
				Jumlah Pakaian Kerja Kebersihan	Stel	30								
				Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Orang	25								
				Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Orang	30								
				Jumlah Penyediaan Sewa Perlengkapan Kantor	Tahun			1						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum Kanator	Tahun					1		1		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	765.980.651	12	500.000.000	12	5.500.000.000	12	5.500.000.000	**LABKES**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Instruktur Olahraga	OK	48	1.736.684.049	48	1.894.641.888	48	2.525.084.632	48	2.525.084.632	**UPELKES**
				Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan	OB	84		84		84		84		
				Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan	OB	144		144		144		144		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Jasa Penceramah Rohani	OK	4		4		4		4		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengelola Asrama	OB	12		12		12		12		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengelola Data	OB	24		24		24		24		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pengelola IT	OB	12		12		12		12		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Resepsionis	OB	24		24		24		24		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Supir	OB	12		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pengangkutan Sampah	Bulan	12		12		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pest Control	Bulan/OB	12		12		12		12		
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Teknisi Elektro	OB	-		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pengelola Mutu	Bulan	-		12		12		12		
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pengembang Teknologi Pembelajaran	Bulan	-		12						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor/Satpam	Orang	20	4.596.951.960	24	4.000.000.000	24	4.400.000.000	24	4.400.000.000	**RSKK**
				Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service	Orang	20		24		24		24		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jasa Kebersihan untuk Pusat Isolasi Mandiri Covid-19	Orang	12		-						
				Jasa Pembuangan Sampah	Orang	20		-						
				Jasa Pengemudi untuk Pusat Isolasi Mandiri Covid-19	Orang	6		-						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Bulan	13	6.384.201.550		7.500.000.000		8.250.000.000		8.250.000.000	**RSUD JAMPANG**
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan			12		12		12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Satpam, Pengemudi dan Front Office	Bulan	12	9.711.876.971	12	10.505.000.000	-	15.000.000.000	-	15.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pramubakti	Bulan	12		12		-		-		
				Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Keamanan/ Pengemudi/ Front Office	Bulan	12		12		-		-		
				Jaminan / BPJS Honorarium Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	Bulan	12		12		-		-		
				Terlaksananya keamanan dan kebersihan di Rumah Sakit Jiwa Prov. Jabar	Bulan	-		-		12		12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Bulan	12	3.537.527.871	12	3.850.000.000	12	4.235.000.000	12	4.235.000.000	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1) Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Surat Menyurat	Paket	1	-	-	-					**UPELKES**
				2) Jumlah Pengiriman Surat/Paket	Paket	1		-						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya Pengiriman Surat	Bulan	12	20.000.000	-	-					**RSKK**
				Penyediaan Perangko dan Materai	Bulan	12		-						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Langganan Surat Kabar	Bulan	12	14.580.000							**RS JIWA**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel			**4.733.470.958**				**2.600.000.000**		**2.600.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja BBM	Liter	14285	975.200.000		1.267.760.000		550.000.000		550.000.000	
				Jumlah Belanja KIR	Kali	35								
				Jumlah Belanja Pelumasan	Unit	125								
				Jumlah Belanja Perpanjangan STNK	Unit	60								
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	21								
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit	14								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan	Bulan			12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	238.300.000		1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	**LABKES**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	6	191.061.200	6	222.450.000	6	252.200.784	6	252.200.784	**UPELKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Service / Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6		6		6		6		
				Jumlah Waktu Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Bulan	12		12		12		12		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM Dexlite/Solar	Liter	4700	425.280.000	9500	500.000.000	9500	500.000.000	9500	500.000.000	**RSKK**
				BBM Dexlite/Solar Khusus Penanganan Covid-19	Liter	4800								
				BBM Pertalite	Liter	7150		16750		16750		16750		
				BBM Pertalite Khusus Penanganan Covid-19	Liter	9600								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pelumas Kendaraan Roda 2	Unit	6		6		6		6		
				Pelumas Kendaraan Roda 4	Unit	10		12		12		12		
				Service Kendaraan Roda 2	Unit	5		6		6		6		
				Service Kendaraan Roda 4	Unit	4		12		12		12		
				STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Unit	16		18		18		18		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlakasana Pajak STNK Kendaraan Dinas R3	Unit	3	615.150.000	3	676.340.000	-	900.000.000	-	900.000.000	**RS JIWA**
				Terlaksana KIR Kendaraan Pick UP	Unit	2		2		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terlaksana Pajak STNK Kendaraan Dinas R2	Unit	13		13		-		-		
				Terlaksana Pajak STNK Kendaraan Dinas R4	Unit	17		17		-		-		
				Terlaksana Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit	21		21		-		-		
				Tersedia BBM Kendraan Dinas Operasional	Bulan	12		12		-		-		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Bulan	-		-		12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional/Dinas	Bulan	12	534.060.000	12	300.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	**RS PARU**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kamar Dingin Vaksin	Bulan	12	1.820.032.858		2.366.042.000		850.000.000		850.000.000	
				Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pest Kontrol	Bulan	12								
				Jumlah Pemeliharaan Area Parkir Gedung Kantor	Bulan	12								
				Jumlah Pemeliharaan Fisik Gedung Bangunan Kantor	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pemeliharaan Gudang Obat	Bulan	12								
				Jumlah Pemeliharaan Kaca dan Dinding Gedung Kantor	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan			12		12		12		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Unit/Bulan	1	2.980.253.000	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	2.750.000.000	**LABKES**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			463.800.000		162.730.000		179.003.000		179.003.000	**UPELKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		-		-		-		-		
				Jumlah Pemeliharaan Fasad dan Dinding Kaca Gedung	Pekerjaan	1		1		-		-		
				Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan	1		1		-		-		
				Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman	Pekerjaan	1		1		-		-		
				Jumlah Pemeliharaan Fasad dan Dinding Kaca Gedung	Pekerjaan	-		-		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan	-		-		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman	Pekerjaan	-		-		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penataan Bangunan Tempat Penampungan Sampah	Pekerjaan	-		-		1		1		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Pekerjaan	1	7.952.165.473	-		-		-		**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan				-		-		-		
				Jumlah Pembangunan Pagar	Pekerjaan	1		-		-		-		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Pekerjaan	10	914.000.000	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.100.000.000	**RSKK**
				Pemeliharaan Taman	Pekerjaan	1		1		2		2		
				Pemeliharaan Jaringan Listrik	Pekerjaan			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Bulan	12	2.217.236.378	12	4.095.209.000	12	2.606.663.400	12	2.606.663.400	**RS PARU**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan AC	Bulan	12	1.938.238.100		2.519.709.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Akat Fitnes	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Alat Komunikasi	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan CCTV	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Filling Cabinet	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Filling Kabinet	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Forklift	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Foto Ccopy	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Genser	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Handycam/ Kamera	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan LAN/ Internet	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan Listrik	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Komputer	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Lift	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin Ketik	Bulan	12								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Meubeulair	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Pompa	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Sound	Bulan	12								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Torn Air	Bulan	12								
				Jumlah Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Bersih	Bulan	12								
				Jumlah Pemeliharaan Taman/ Tanaman Hias	Bulan	12								
				Jumlah Penyediaan Jasa Penyedotan Septic Tank	Kali	4								
				Jumlah Bulan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Kantor	Bulan			12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kalibrasi Alat Kesehatan	Pekerjaan	1	1.030.330.290	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	**RSKK**
				Pemeliharaan Alat Kedokteran	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Alat Panoramic	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Alat Rumah Tangga dan Elektronik	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Pekerjaan	-		-		1		1		
				Pemeliharaan Carestream Digital Radiogaphy	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Dental X-Ray	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Genset	Pekerjaan	1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pemeliharaan Jaringan Komputer	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Komputer	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Mesin CSSD	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Mesin RO	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Nurse Call	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Pneumatic Tube	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Pemeliharaan Ultrasound	Pekerjaan	1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jenis	4	174.100.000	-	-					**LABKES**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC	Pekerjaan	1	375.206.680	1	382.516.631	1	353.697.432	1	353.697.432	**UPELKES**
				Jumlah Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Genset	Pekerjaan	2		2		2		2		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	Pekerjaan	2		2		2		2		
				Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Printer	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Lift	Pekerjaan			1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Mesin Cuci	Pekerjaan	1		1		1		1		
				Jumlah Pemeliharaan Septictank				1		1		1		
				Jumlah Penataan Jemuran Laundry	Pekerjaan	1		-		-		-		
				Jumlah Penataan Meja Front Office	Pekerjaan	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Teknisi Elektro	OB	12		-		-		-		
				Jumlah Penyemprotan Desinfektan		-		-		-		-		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kebutuhan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Bulan			12	5.442.257.080	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pemeliharaan Alat kedokteran 2. Pemeliharaan alat laboratorium 3. Kalibrasi Alat Kesehatan 4. Pemeliharaan Alat berat 5. Pemeliharaan Jaringan (listrik, PABX, Gas Medis, internet) 6. Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7. Pemeliharaan Generator oksigen	Bulan	12	866.540.064	12	3.600.160.000		968.000.000		968.000.000	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terpeliharanya Alat Kedokteran/Kesehatan/Laboratorium, jaringan listrik, Gas Medis, Internet, perlengkapan dan peralatan kantor RS Paru Provinsi Jawa Barat	Bulan			12		12		12		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan			12	500.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	18	218.450.000	18	240.130.000		350.000.000		350.000.000	**RS JIWA**
				Tersediannya Pajak STNK Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	11		11						
				Tersedianya Belanja Pelumasan Kedaraan Dinas Roda 2	Unit	12		12						
				Tersedianya Belanja Pelumasan Kedaraan Dinas Roda 4	Unit	11		11						
				Tersedianya Pajak STNK Kendaraan Roda 2	Unit	12		12						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				terlaksananya pengadaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pajak STNK dan BBM	Bulan	-		-		12		12		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen		**229.687.067.429**	91			**446.889.329.238**		**446.889.329.238**	
				Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	Persen			90						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	Persen			85						
				Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	Persen			80,19						
				Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persen			83						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen			100						
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persen			100						
				Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	Persen			96						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	Persen			88						
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen			90						
				Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Persen			100						
				Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Persen			60						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	Persen			90						
				Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Persen			92						
				Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Persen			95						
				Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	Hari			9						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	Hari			21						
				Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persen			95						
				Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	Persen			80						
				Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	Persen			100						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	Persen			100						
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar pada unit Pelayanan	Jenis		**148.007.234.400**				**33.333.843.000**		**33.333.843.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pengembangan dan Pembangunan Rumah Sakit	Unit									
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan Persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	Kab/Kota									
			Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Gedung	2	87.460.477.000							
			Pengembangan Rumah Sakit	Pembuatan Feasibility Study RS Kesehatan Kerja	Dokumen	1	7.422.161.200	-						**RSKK**
				Pengembangan Prasarana Gedung RS Kesehatan Kerja	Dokumen	3		-						
				Penyusunan Naskah Akademik RS Kesehatan Kerja	Dokumen	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pembuatan pagar	Meter/Gedung	1655	1.639.145.000	-	179.600.000.000	4	47.639.145.000	4	47.639.145.000	**AL IHSAN**
				Jumlah Gedung A lanjutan, Gedung Cardiac Centre, Gedung Rawat Inap, Gedung Stroek center lanjutan, Gedung IGD & Rawat Jalan	Gedung			5						
			Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Modul yang telah di Maintenance sesuai kebutuhan data yang di perlukan pada Aplikasi E-Logistik	Aplikasi/Software	1	146.570.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Modul yang telah di Maintenance sesuai kebutuhan data yang di perlukan pada Aplikasi E-Mosi	Aplikasi/Software	1								
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				-							
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	3	21.060.500.000	7	6.285.160.000		6.600.000.000		6.600.000.000	**RSUD JAMPANG**
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	Jenis					7		7		
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pasien	persen	100	371.954.400	-	-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Tersedianya bahan terapi fungsi untuk pasien di rehabilitasi psikososial	persen	100		-						
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Ketersediaan Rapid Antigen, VTM Swab serta APD dalam Upaya Penanganan Covid-19	Sample	307615	59.203.907.400							
				Jumlah Laporan dan Hasil Kegiatan Deteksi Dini FR PTM pada ASN di Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1								
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1. Belanja Alat Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Unit	4	2.062.787.305	12	15.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	**LABKES**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terpenuhinya alat laboratorium kesehatan	Bulan					12		12		
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1. Pemeliharaan alat-alat laboratorium	Paket	6	1.642.895.000							**RS JIWA**
				2. Pemantapan Mutu Eksternal Lab	Kali	2								
				3. Evaluasi TLD	orang/kali	40								
				4. Kalibrasi alat laboratorium, kesehatan dan kedokteran	Paket	1								
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				-	12	800.000.000					**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1) Jumlah Obat yang didistribusikan ke 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota	27	1.196.280.000		1.386.050.000		33.333.843.000		33.333.843.000	
				2) Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Kabupaten/Kota,dan Buffer Stok Provinsi	Dokumen	3								
				3) Jumlah Dokumen Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang rusak dan kadaluarsa	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				4) Jumlah Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Kefarmasian dan Alkes	Orang	4								
				5)Jumlah Kab / Kota yang telah dilakukan Monev Ketersediaan Logistik Covid-19	Kab/Kota	27								
				Jumlah Alat Pengukur Suhu yang telah dilakukan Kalibrasi	Unit			10		10		10		
				Jumlah Dokumen Laporan Penguatan Penatalaksanaan Sediaan Farmasi	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Pemusnahan Obat dan dan Perbekalan Kesehatan yang rusak dan Kadaluarsa	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat dan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program	Dokumen			3		3		3		
				Jumlah Kab/Kota yang Telah dilakukan Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota yang telah terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota			27		27		27		
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	Kab/Kota			25		25		25		
				Jumlah Operator Kab/Kota yang telah dilakukan Sosialisasi Aplikasi SIHA	Orang			54		54		54		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Tenaga Teknis Pendamping Program Pelaksana Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Orang			4		4		4		
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. Jumlah Parameter Pemeriksaan Lingkup Baru Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Parameter/Dokumen	2	228.168.722.781	2	8.451.465.123	1	16.500.000.000	1	16.500.000.000	**LABKES**
				2. Jumlah DED Pembanguan Satuan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen DED	1		1						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendampingan Teknis Sertifikasi ISO	Kali	1	354.080.000	-	-	-	-	-	-	**UPELKES**
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1. Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Bulan	12	497.300.000	12	44.665.928.500					**LABKES**
				Jumlah Parameter jumlah pengadaan reagen pemeriksaan lingkup baru akreditasi	Bulan					12	42.790.000.000	12	42.790.000.000	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Pengadaan Obat	Jenis	109	7.400.000.000		8.000.000.000		8.800.000.000		8.800.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Obat dan BHP	Jenis			390		390		390		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya Rapid Test Kit	buah	500	6.770.479.295		3.366.395.000		4.000.000.000		4.000.000.000	**RS JIWA**
				Tersedianya fasiltas pelayanan keperawatan: Bahan dan alat pembersih, paket perlengkapan kebersihan diri pasien, Alat rumah tangga, Bahan Linen, Pakaian pasien	Bulan					12		12		
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah linen pasien	Jenis			20	3.223.558.235	20	765.183.000	20	765.183.000	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah linen petugas	Jenis			2		2		2		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				-	-	-	-				**UPELKES**
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (DAK)	Jenis	10	41.444.313.328		40.226.256.788		36.887.934.000		36.887.934.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan	Jenis			30		30		30		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Penyediaan Alat Kedokteran Umum	Jenis	19	10.423.644.580	19	9.000.000.000	19	5.500.000.000	19	5.500.000.000	**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Alat Penunjang Lainnya	Jenis	7		7		7		7		
				Penyediaan Alat Untuk Penanganan Covid-19	Jenis	9		9		9		9		
				Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana DBH-CHT	Jenis			7						
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	Jenis			-	-	19	1.100.000.000	19	1.100.000.000	**RSKK**
				Pemeliharaan Alat Penunjang Lainnya	Jenis			-		7		7		
				Pemeliharaan Alat Untuk Penanganan Covid-19	Jenis			-		9		9		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/kedokteran Umum	Unit	5	21.240.856.978	6	27.713.662.000					**RSUD JAMPANG**
				Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	Jenis					6	21.600.000.000	6	21.600.000.000	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/kedokteran Umum	Unit	5	21.240.856.978	6	27.713.662.000					**RSUD JAMPANG**
				Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	Jenis					6	21.600.000.000	6	21.600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Alat	499	275.000.000	515	500.000.000		600.000.000		600.000.000	**RSUD JAMPANG**
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipelihara	Alat			-		515		515		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1. Belanja Alat-alat Kedokteran Umum	Alat	15	4.549.093.176		6.559.200.000		15.000.000.000		15.000.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah Belanja Alat-alat Kedokteran Umum dan kebutuhan keperawatan	Jenis			17		17		17		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang yang terpelihara dan terkalibrasi	Alat			20	714.086.150	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	**RS JIWA**
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan RS Paru	Persen	100	19.152.885.575	100	36.281.816.000		21.068.174.133		21.068.174.133	**RS PARU**
				Terpenuhinya Fasilitas Layanan Kesehatan RS Paru	Persen					100		100		
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	alat kesehatan/alat penunjang medik yang dipelihara	Bulan			-	-	12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran	Jenis	24	22.146.298.587	67	22.146.298.587	67	49.321.331.446	67	49.321.331.446	**AL IHSAN**
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bulan				9.100.000.000	12	9.100.000.000	12	9.100.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Gedung yang dibangun	Unit									
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung yang di bangun beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	4	49.503.987.725	-	-					**RSUD JAMPANG**
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya Gedung Diagnostic Center	Gedung			1	50.081.157.878	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terbangunnya gedung pelayanan Rawat Jalan Intensif (RJI)	Gedung			1		1		1		
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Resep	110000	9.997.531.080	30	13.500.000.000					**RSUD JAMPANG**
				Jumlah penggunaan Obat dan Bahan Pakai Habis penunjang pelayana kesehatan	Jenis			-		30	16.500.000.000	30	16.500.000.000	
			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1	5.220.383.470	-	-					**RS JIWA**
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Kegiatan	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Kegiatan	1		-						
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Kegiatan	1		-						
				Tersedianya bahan kimia	Kegiatan	1		-						
				Tersedianya Genset	Paket	1		-						
				Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Kegiatan	1		-						
				Tersedianya sumur artesis	Paket	1		-						
			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran	Jenis	53	49.911.971.190	286	80.030.633.807	286	102.550.533.497	286	102.550.533.497	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksana Pemeliharaan Alat Elektronik	keg	1	1.559.178.300							**RS JIWA**
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksana Pemeliharaan Bangunan	keg	1	2.286.949.700							**RS JIWA**
				Terlaksana Pemeliharaan Bangunan Air	keg	1								
				Terlaksana Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	keg	1								
				Terlaksana Pemeliharaan Ruang Dekontaminasi	keg	1								
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana medicine	Bulan	12	205.050.185							**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya mamin petugas khusus, vaksin petugas beresiko, alkes habis pakai	Kegiatan			3	3.403.631.250	3	4.000.000.000	3	4.000.000.000	**RS JIWA**
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab/Kota		**78.340.272.469**				**410.591.703.938**		**410.591.703.938**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Kejadian Luar Biasa Provinsi	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kab/Kota									
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Rumah Sakit Kab/Kota yg memenuhi standar	Rumah Sakit									
				Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Kab/Kota									
				Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kabupaten/Kota dengan Persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	Kab/Kota									
				Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%	Kab/Kota									

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1	1.273.733.922	1		1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	
				2) Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan;	Dokumen	1				1		1		
				3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di Jawa Barat;	Dokumen	1		1		1		1		
				Jumlah dokumen rencana kontijensi bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1						
				5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji;	Kabupaten/Kota	27		1		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan kegiatan program bencana bidang kesehatan;	Orang/Kab/Kota	1		1		27		27		
				7) Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji;	Kabupaten/Kota	27		1		27		27		
				8) Jumlah tenaga teknis program yang honorariumnya terbayar	Teknis	1								
				Laporan RHA bencana alam di wilayah Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Covid 19	Dokumen	1	25.717.013.335	1	20.000.000.000	1	22.000.000.000	1	22.000.000.000	
				11) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Surveilans PD3I	Dokumen	1		1		1		1		
				12) Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Epidemiologi Kasus PD3I	Dokumen	1		1		1		1		
				13) Jumlah Tenaga Teknis Program Honorarium yang terbayar	Orang/Kab/Kota	1		1		3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				1) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Evaluasi Surveilans PD3I/AFP	Kabupaten/Kota	27		27		27		27		
				2) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat	Kab/Kota	27		27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans dan Rumah Sakit Wilayah 1	Kab/Kota	6								
				4) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans dan Rumah Sakit Wilayah 2	Kab/Kota	5								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				5) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans dan Rumah Sakit Wilayah 3	Kab/Kota	6								
				6) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans dan Rumah Sakit Wilayah 4	Kab/Kota	5								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans dan Rumah Sakit Wilayah 5	Kab/Kota	5								
				8) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB/Covid 19	Kabupaten/Kota	27		27						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				9) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans Dinas Kab/Kota mengikuti Pertemuan SKDR	Kab/Kota	27		27		27		27		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	10) Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Teknis Dana DAK Non Fisik Bagi Program Kesga (BOK)			385.502.734		1.842.206.698		1.100.000.000		1.100.000.000	
				11) Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Orientasi SHK (BOK)										
				12) Jumlah dokumen pelaksanaan Sinkronisasi dan Validasi Data (BOK)										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				13) Jumlah dokumen pelaksanaan Orientasi Antenatal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC) Tingkat Provinsi (BOK)										
				14) Jumlah dokumen pelaksanaan Updating Pelayanan Kesehatan Balita bagi Bidan/Nakes di Desa (BOK)										
				1) Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Sasaran Ibu Hamil	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				2) Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Sasaran Ibu Hamil	Dokumen	1								
				3) Jumlah dokumen pelaksanaan Video Conference Pertemuan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi	Dokumen	1								
				4) Jumlah dokumen pelaksanaan Dukungan Manajemen : Honor Tenaga Teknis Kegiatan	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				5) Jumlah dokumen pelaksanaan Konsultasi Pusat dan Pemenuhan Undangan Luar Daerah	Dokumen	1								
				6) Jumlah dokumen pelaksanaan Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Pemenuhan Undangan	Dokumen	1								
				7) Jumlah dokumen pelaksanaan Orientasi Konseling dan Pelayanan KB (BOK)	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				8) Jumlah dokumen pelaksanaan Orientasi Penggunaan Panduan Praktis untuk Caregiver pada Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia (BOK)										
				9) Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Implementasi Pelayanan Catin (BOK)										
				Jumlah dokumen pelaksanaan dukungan manajemen	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah dokumen pelaksanaan konsultasi pusat dan pemenuhan undangan luar daerah	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah dokumen pelaksanaan penguatan program pelayanan kesehatan keluarga dan pemenuhan undangan	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah dokumen pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Program Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah dokumen pelaksanaan video conference pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan keluarga dengan lintas program/ lintas sektor	Dokumen			4		4		4		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah dokumen pelaksanaan video conference pertemuan koordinasi program pelayanan kesehatan keluarga di tingkat provinsi	Dokumen			6		6		6		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	Dokumen	1	515.860.000							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	Dokumen	1	351.986.534		350.000.000		385.000.000		385.000.000	
				Jumlah dokumen pelaksanaan pemberdayaan usia lanjut dalam peningkatan status kesehatan keluarga dan masyarakat	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah dokumen pelaksanaan pertemuan evaluasi program kesehatan usia lanjut di tingkat provinsi	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah dokumen pelaksanaan pertemuan koordinasi program kesehatan usia lanjut di tingkat provinsi	Dokumen			1		1		1		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Percepatan Penanggulangan Stunting Di Jawa Barat	Dokumen	1	999.999.462		1.337.663.126		1.100.000.000		1.100.000.000	
				2. Jumlah Dokumen Laporan Pertemuan Penguatan Indikator Spesifik Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3. Jumlah Dokumen Laporan Vidio Confrence Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Mayarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dalam Pencegahan COVID-19										
				4. Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan Bintek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19										
				5. Jumlah Dokumen Laporan Dukungan Manajemen Gizi Masyarakat										
				6. Fasilitasi dan Pendampingan pelaksanaan Surveilnas Gizi										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7. Penguatan Pelaksanaan Pedoman Gizi Seimbang										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Surveilans Gizi	Dokumen					1		1		
				Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	Kab/Kota			27		24		24		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1) Monitoring Evaluasi Kebugaran Calon Jemaah Haji	Dokumen Laporan	1	226.156.500		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
				2) Pembinaan Program Kesehatan Kerja di Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3) Pembinaan Teknis Kesehatan Olahraga	Dokumen Laporan	1								
				Konsultasi ke Pusat	Dokumen			1		1		1		
				Monitoring Evaluasi Kebugaran Calon Jemaah Haji	Kab/Kota			7		7		7		
				Pembinaan Program Kesehatan Kerja di Kab / Kota	Kab/Kota			9		9		9		
				Pembinaan Teknis Kesehatan Olahraga	Kab/Kota			10		10		10		
				Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Pertemuan K3 Perkantoran	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pertemuan Kesehatan Olahraga Masyarakat Tk. Provinsi	Kab/Kota			27		27		27		
				Pertemuan Penguatan Pos UKK	Kab/Kota			27		27		27		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1) Monitoring Percepatan ODF	Kabupaten/Kota	27	689.243.940		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
				2) Bimtek Kabupaten/Kota Sehat Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri	Kabupaten/Kota	10								
				3) Tenaga Pendamping Program	Orang	2								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				4) Dukungan Kesehatan Covid 19 sesuai PMK 17 TA 2021 – Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Medis dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Kabupaten/Kota	27								
				5) Dukungan Kesehatan Covid 19 sesuai PMK 17 TA 2021 - Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Limbah Medis dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Kabupaten/Kota	27								
				Bimtek Pengawasan Kualitas Air Minum	Kab/Kota			15		15		15		
				Evaluasi Citarum Harum	Kab/Kota			12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Konsultasi ke Pusat	Dokumen			1		1		1		
				Monev Citarum Harum	Kab/Kota			11		11		11		
				Monev Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit	Kab/Kota			26		26		26		
				Monitoring Evaluasi Kabupaten Kota Sehat	Kab/Kota			26		26		26		
				Monitoring Evaluasi Percepatan ODF	Kab/Kota			20		20		20		
				Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Limbah Medis Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Kab/Kota			27		27		27		
				Pertemuan Evaluasi KKS	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pertemuan Evaluasi Percepatan ODF (Workshop STBM)	Kab/Kota			27		27		27		
				Pertemuan Koordinasi PKAM	Kab/Kota			27		27		27		
				Tenaga Pendamping Program	Orang			2		2		2		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Bulan	12	592.500.000	12	784.970.000	12	627.990.000	12	627.990.000	**RS PAMEUNGPEUK**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3	Jenis	7	2.499.709.250	7	2.000.000.000	7	2.200.000.000	7	2.200.000.000	**RSKK**
				Penyediaan Alat Informasi Penunjang K3RS	Jenis	7		7		7		7		
				Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran	Jenis	2		2		2		2		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Jasa Kalibrasi	Keg	8	930.380.000	-	930.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	**RS JIWA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terlaksananya Jasa Pembuangan Sampah	Kali	36		-						
				Terlaksananya Jasa Pengangkutan Limbah B3 medis	Kg	3600		-						
				Jumlah waktu pengelolaan lingkungan rumah sakit jiwa	Bulan			12		12		12		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional di FKTP dan FKTL	Dokumen	1	423.354.000		344.830.000		344.830.260		344.830.260	
				Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional di FKTP dan FKTL	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Dokumen laporan Monitoring Kewaspadaan Umum dan Pembinaan Kesehatan Kerja Pada Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dokumen			27		1		1		
				Kab/Kota terfasilitasi Pertemuan keselamatan dan keamanan Pelayanan Kesehatan Tradisioanal	Kab/Kota			27		27		27		
				Kab/Kota terfasilitasi Pertemuan Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab/Kota			1		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen laporan Monitoring Kewaspadaan Umum dan Pembinaan Kesehatan Kerja Pada Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dokumen			1		-		-		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Jumlah kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian TB;	Dokumen	1	18.776.248.884	-	9.516.824.770	-	9.670.363.297	-	9.670.363.297	
				2. Jumlah kinerja Kab/Kota Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDs dan IMS;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3. Jumlah kinerja Kab/Kota melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular ISPA;	Dokumen	1		-		-		-		
				4. Jumlah kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP;	Dokumen	1		-		-		-		
				5. Jumlah laporan kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian DBD;	Dokumen	1		-		-		-		
				6. Jumlah laporan kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian malaria;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7. Jumlah laporan kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta;	Dokumen	1		-		-		-		
				8. Jumlah laporan kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				9. Jumlah laporan kinerja Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Dokumen	1		-		-		-		
				10. Jumlah Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular				-		-		-		
				11.Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				12. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 HIV dapat Terpenuhi	Kabupaten/Kota	15		-		-		-		
				13. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota)	Dokumen	4		-		-		-		
				14. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan, Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia	Dokumen	1		-		-		-		
				15. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				16. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 kabupaten/kota	Dokumen	1		-		-		-		
				17. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV	Dokumen	1		-		-		-		
				18. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Manjemen Program sesuai pedoman	Dokumen	1		-		-		-		
				19. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik,	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				29. Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI;	Dokumen	1		-		-		-		
				30. Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2021 dan tersosialisasi up date Program 2022;	Orang	62		-		-		-		
				31. Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas;	Orang	54		-		-		-		
				32. Jumlah Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi	Orang	100		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				33. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat	Dokumen	1		-		-		-		
				34. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran dalam penguatan jejaring kerjasama profesi (lintas sektor)	Dokumen	1		-		-		-		
				35. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing-masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA	Dokumen	1		-		-		-		
				36. Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP	Kabupaten/Kota	20		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				37. Diperolehnya dokumen pemantauan Sentinel ILI	Dokumen	1		-		-		-		
				38. Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP	Dokumen	1		-		-		-		
				39. Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus	Kabupaten/Kota	10		-		-		-		
				40. Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		
				41. Jumlah Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Subdit HPISP	Laporan	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				42. Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis di 13 kab/kota	Laporan	1		-		-		-		
				43. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat	Dokumen	1		-		-		-		
				44. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria	Dokumen	1		-		-		-		
				45. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				46. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus	Dokumen	1		-		-		-		
				47. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu	Dokumen	1		-		-		-		
				48. Daerah non Endemis kusta melakukan kegiatan ICF	Kabupaten/Kota	7		-		-		-		
				49. Petugas di refreshing Tatalaksana Kasus	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		
				50. Data di Validasi	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		
				51. Permasalah kusta didiskusikan di Pusat	Dokumen	1		-		-		-		
				52. permasalah kusta didiskusikan di Kabupaten dan puskesmas	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				53. Kesepakatan Lintas sektor dalam pengendalian Penyakit Kusta	Dokumen	1		-		-		-		
				54. Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis dan Reduksi Cacingan	Dokumen	1		-		-		-		
				55. Jumlah dokumen pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur	Dokumen	1		-		-		-		
				56. Jumlah dokumen kegiatan pengendalian filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota	Dokumen	1		-		-		-		
				57. Jumlah dokumen kegiatan pengendalian cacingan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				58. Jumlah Tenaga pendamping Filariasis dan cacingan dapat terpenuhi sebanyak 2 orang	Dokumen	1		-		-		-		
				59. Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Cacingan dapat terupdate segera	Dokumen	1		-		-		-		
				60. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				61. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di indonesia dan di jawa barat	Dokumen	1		-		-		-		
				62. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zooinosis di Daerah Perbatasan Provinsi	Laporan	1		-		-		-		
				63. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Daerah Perbatasan	Laporan	1		-		-		-		
				64. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evbaluasi P2 Zoonosis	Laporan	1		-		-		-		
				65.Kab/Kota melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				66. Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;	Dokumen	1		-		-		-		
				67. Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program P2PTM;	Dokumen	1		-		-		-		
				68. Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Kanker dan Gangguan Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				69. Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Sektor dan Petugas Kesehatan Puskemas;	Dokumen	1		-		-		-		
				70. Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Diabetes Melitus Sedunia;	Dokumen	1		-		-		-		
				71. Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Thalassemia Sedunia;	Dokumen	1		-		-		-		
				72. Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Sedunia;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				73. Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM;	Orang	2		-		-		-		
				74. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PJPD;	Dokumen	1		-		-		-		
				75. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PKKD;	Dokumen	1		-		-		-		
				76. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Program P2DMGM;	Dokumen	1		-		-		-		
				77. Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Teknis Program P2PTM;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				78. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PTM;	Dokumen	1		-		-		-		
				79. Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Program GIF;	Dokumen	1		-		-		-		
				80. Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota;	Dokumen	1		-		-		-		
				81. Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Puskesmas;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				82. Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Tingkat Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1		-		-		-		
				83. Jumlah Laporan Peringatan Hari Disabilitas Internasional;	Dokumen	1		-		-		-		
				84. Jumlah Laporan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia;	Dokumen	1		-		-		-		
				85. Jumlah Pendamping Teknis GIF;	Orang	1		-		-		-		
				86. Dokumen laporan evaluasi dan kesepakatan tindaklanjut deteksi dini FR PTM pada ASN Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				87. Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Program GIF	Dokumen	1		-		-		-		
				Jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Monitoring Pelaksanaan Program P2 Penyakit Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP)	Kab/Kota	-		20		20		20		
				Jumlah Dokumen Evaluasi Model Intervensi Desa Bebas TBC	Dokumen	-		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Kab/Kota	-		27		27		27		
				Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dokumen	-		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Tidak Menular	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan P2 Zoonosis di tingkat Provinsi	Laporan	-		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Penguatan GIRIJ	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Peningkatan Manajemen Program untuk Pencatatan dan Pelaporan	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Workshop Deteksi Dini Gangguan Indera dan Fungsional	Dokumen	-		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melaksanakan Sistem Informasi & Managemen Pelaporan Filariasis & Cacingan	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan managemen Kasus & Tatalaksana Filariasis	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah dokumen kesepakatan pada 2 Korwil petugas laboratorium Kab/Kota memahami pemeriksaan mikrofilaria dan pemeriksaan cacing	Dokumen	-		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Kontrak Tenaga IT Program P2 TBC	Dokumen	-		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah dokumen kontrak Tenaga pendamping Filariasis dan cacingan dapat terpenuhi	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Kontrak Tenaga Pendamping Teknis Program P2 TBC	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Kolaborasi TB DM	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Kolaborasi TB HIV	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Logistik P2 TBC	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Penguatan Surveilans P2 TBC	Dokumen	-		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Pertemuan TBC Anak	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Perumusan Model Intervensi Desa Bebas TBC	Dokumen	-		2		2		2		
				Jumlah Dokumen terbaru terkait kebijakan, pedoman dan tatalaksana kasus Zoonosis	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Virtual Meeting Silantor	Dokumen	-		1		1		1		
				Jumlah Kabupaten Kota yang Melaksanakan tatalaksana kasus Zoonosis sesuai standar	Dokumen	-		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Assesment Pengendalian Cacingan	Laporan	-		19		19		19		
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium Rujukan Intermediate	Laporan	-		26		26		26		
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Bimbingan Teknis P2 DBD	Laporan	-		25		25		25		
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Bimbingan Teknis P2 TBC	Laporan	-		26		26		26		
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Surveilans P2 TBC	Laporan	-		26		28		28		
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Perumusan Model Intervensi Desa Bebas TBC	Laporan	-		28		16		16		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Laporan hasil Kegiatan Supervisi Layanan TBC RO	Laporan	-		16		8		8		
				Jumlah Laporan Hasil konsultasi dengan Kemenkes RI	Laporan	-		8		2		2		
				Jumlah Laporan hasil Konsultasi Pengendalian Filariasis & Cacingan	Laporan	-		2		3		3		
				Jumlah Laporan hasil Konsultasi Teknis P2 DBD ke Pusat	Laporan	-		3		1		1		
				Jumlah Laporan hasil Konsultasi Teknis P2 TBC	Laporan	-		1		2		2		
				Jumlah Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi GIRIJ	Laporan	-		2		26		26		
				Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek Managemen P2 Filariasis	Laporan	-		-		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan Survei Penularan Kejadian Filariasis	Dokumen	-		-		3		3		
				Jumlah Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas Mengikuti Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Compliance Zink	Orang	-		-		54		54		
				Jumlah Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Mengikuti Pertemuan Evaluasi & Perencanaan Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP)	Orang	-		-		54		54		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Mengikuti Pertemuan Validasi Data Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP)	Orang	-		-		27		27		
				Jumlah Petugas Dinas Kesehatan Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Konsultasi Teknis Program P2 Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP) dari Kemenkes RI	Laporan	-		-		2		2		
				Jumlah Tenaga Administrasi Pendamping Teknis Program P2 Hepatitis & Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (HPISP)	Dokumen	-		-		1		1		
				Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM	Orang	-		-		2		2		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	meningkatnya pelayanan rs	tahun	1	64.606.900	-	-					**RS JIWA**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1) Monev Kesling Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	27	410.500.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
				2) Penilaian Asrama Haji	Kabupaten/Kota	6								
				3) Workshop Kesehatan Lingkungan dalam rangka Mendukung Citarum Harum										
				Bimtek Pendampingan TFU	Kab/Kota			18		18		18		
				Bimtek Pendampingan TPP dalam rangka Penyelenggaraan TPP Sehat	Kab/Kota			18		18		18		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Pangan dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji	Dokumen			1		1		1		
				Pengawasan IKL Higiene Sanitasi Embarkasi Haji	Dokumen			1		1		1		
				Pengawasan IKL Higiene Sanitasi Pangan di TPP tempat Transit Calon Jemaah Haji	Kab/Kota			6		6		6		
				Penilaian Asrama Haji	Dokumen			1		1		1		
				Pertemuan Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan dan Depot Air Minum	Dokumen			27		27		27		
				Workshop Pendampingan IKL Tempat dan Fasilitas Umum	Kab/Kota			20		20		20		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1. Dokumen laporan hasil kesepakatan pertemuan koordinasi upaya deteksi dini kesehatan jiwa anak sekolah bagi di 27 Kab Kota	Dokumen	1	656.117.220	-	994.644.400	-	1.100.000.000	-	1.100.000.000	
				2. Dokumen laporan hasil bimbingan teknis program Kesehatan jiwa	Dokumen	1		-		-		-		
				3. Dokumen hasil laporan kegiatan hasil implementasi skrining kesehatan jiwa pada anak sekolah dengan quesioner SDQ di 14 Kab/Kota	Dokumen	1		-		-		-		
				4. Dokumen laporan hasil kesepakatan peningkatan kemampuan teknis petugas pengelola penyalahgunaan napza bagi petugas provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				5. Dokumen laporan dan hasil kesepakatan pertemuan evaluasi dan perencanaan pengendalian kesehatan jiwa	Dokumen	1		-		-		-		
				6. Dokumen laporan dan hasil kesepakatan workhsop deteksi dini penatalaksanaan gangguan jiwa bagi petugas kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1		-		-		-		
				7. Pendamping tekhnis program kesehatan jiwa	Orang	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				8. Dokumen hasil laporan konsultasi teknis program kesehatan jiwa ke kementerian kesehatan	Dokumen	1		-		-		-		
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Kab/Kota			27		27		27		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1. Family gathering	Kegiatan	3	789.665.000	-	600.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	**RS JIWA**
				2.Sosialisasi deteksi dini gangguan kesehatan jiwa anak sekolah bagi guru BK SMTA/SMK da SLB	Kegiatan	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3.Sosialisasi deteksi dini gangguan kesehatan jiwa bagi kader, torma, toga dan aparat	Kegiatan	1		-						
				4.Sosialisasi deteksi dini gangguan kesehatan jiwa anak sekolah bagi siswa SMA/SMK dan SLB	Kegiatan	1		-						
				5.Dropping pasien	Kali	10		-						
				6.Hpme visite	Kali	30		-						
				7.Mobile outreach	Kali	15		-						
				8.FGD (advokasi pasien bermasalah)	Kali	5		-						
				9.Membangun kemitraan dan koordinasi dengan stek holder terkait keswa	Dokumen	1		-						
				10.Pelatihan/dukungan sosial ODGJ	Kali	1		-						
				11.Integrasi pelayanan rehabilitasi psikososial berbasisi masyarakat	Kali	2		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				12Sosialisasi kesehatan jiwa bagi komunitas/masyarakat	Kali	1		-						
				13. Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan prilaku anak remaja	Klai	1		-						
				14.Sosialisasi keswa lansia ke petugas pantai werda	Kali	2		-						
				15.Pertemuan koordinasi rujuknan keswa dengan kabupaten/kota	Kali	1		-						
				16.Penanganan pasien pasung	pasien	100		-						
				17.Pertemuan koordinasi lintas program lintas sektor tentang palayanan keswa	Kali	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				18.Workshop penguatan layanan kesehatan jiwa lanjut usia	Kali	1		-						
				19.Koordinasi internal	kali	18		-						
				Tertanganinya pasien pasung, antar jemput pasien, pertemuan dengan guru BK dan siswa, family gathering, pembinaan LKS, koordinasi dengan stakeholder TPKJM, manajemen komunitas keswa dan terselenggaranya kegiatan promosi Rumah Sakit	Persen			100						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				-		-		-			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Penyediaan Publikasi	Jenis	3	2.957.474.911	3	3.000.000.000	3	3.300.000.000	3	3.300.000.000	**RSKK**
				Penyelenggaraan Workshop dan Pelatihan	Kegiatan	3		3		3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1	1.315.135.189	-	3.400.000.000	-	354.647.948.781	-	354.647.948.781	
				2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;	Dokumen	1		-		-		-		
				3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jaminan Kesehatan di 5 UPTD Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat;	Dokumen	1		-		-		-		
				5) Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Percepatan Klaim dan Dispute Klaim Covid-19;	Dokumen	1		-		-		-		
				6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi Percepatan Klaim dan Dispute Klaim	Dokumen	1		-		-		-		
				7) Jumlah Dokumen Laporan Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI JK				-		-		-		
				Jumlah Dokumen Laporan Advokasi Capaian UHC Kab/Kota di Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan JKN	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencapaian UHC	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Pembiayaan Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI - JK Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Percepatan Klaim dan Dispute Klaim Covid -19	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas tentang pembiayaan dan jaminan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan PHA (p) Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan Puskesmas kab/Kota Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Rapat Persiapan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Lintas Batas Provinsi	Dokumen			1		1		1		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu Yang Terlayani di Rawat Inap	Orang	1050	7.000.000.000	4250	7.000.000.000					**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang					4250	7.700.000.000	4250	7.700.000.000	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Pasien Gakin	Orang			1625	1.500.000.000	1625	1.650.000.000	1625	1.650.000.000	**RSKK**
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pasien	2900	7.543.900.000	7750	15.000.000.000		16.500.000.000		16.500.000.000	**RSUD JAMPANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya sharing pelayanan GAKIN	Pasien					7750		7750		
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung	Bulan	12	4.500.000.000	-	2.500.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	**RS JIWA**
				Tercapainya realisasi transaksi jaminan kesehatan (JPKM)	Persen			90						
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin	Persen	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	**RS PARU**
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pasien/Jiwa	748	8.000.000.000	1870	10.000.000.000	1870	18.000.000.000	1870	18.000.000.000	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1). Jumlah Dokumen Laporan dan Kesepakatan dalam Pembinaan PIS-PK di masing-masing-masing Daerahnya ;	Kabupaten/Kota	27	5.823.691.000	-	-	-	-	-	-	
				2). Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2022 terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota;	Kabupaten/kota	27		-		-		-		
				3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Penggunaan Data PISPK dalam intervensi dan perencanaan kegiatan;	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				4). Jumlah Dokumen Laporan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan BOK di 5 Wilayah.	Dokumen	1		-		-		-		
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.) Kab/Kota terfasilitasi monitoring dan evaluasi manajemen dan upaya pelayanan kesehatan primer oleh provinsi.	Dokumen/ Kab/Kota	27	1.371.029.679	-	1.299.999.840	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	
				2.) Dokumen laporan Penguatan Manajemen Puskesmas Dalam Penanganan Covid 19 dan Standar PPI	Dokumen	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3.) Kab/Kota terpantau pelayanan kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional.	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		
				4.) Dokumen laporan verifikasi lapangan pemberian rekomendasi registrasi puskesmas	dokumen	1		-		-		-		
				5.) Dokumen laporan Tenaga Pendamping Program	dokumen	1		-		-		-		
				6.) kab/Kota terfasilitasi Penguatan fasyankes dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19	Kabupaten/Kota	27		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Dokumen laporan Penguatan Manajemen Puskesmas Dalam Pasca Covid19 dan Standar PPI	Dokumen			1		1		1		
				Dokumen laporan Tenaga Pendamping Program	Dokumen			1		1		1		
				Dokumen laporan verifikasi lapangan pemberian rekomendasi registrasi puskesmas	Dokumen			1		1		1		
				Kab/Kota terfasilitasi Monitoring dan Evaluasi kewaspadan umum pada Puskesmas	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Kab/Kota terfasilitasi monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan primer	Kab/Kota			27		27		27		
				Kab/Kota terfasilitasi monitoring dan evaluasi program Klinik Tingkat Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota			27		27		27		
				kab/Kota terfasilitasi Penguatan fasyankes dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19	Kab/Kota			27		27		27		
				Kab/Kota terfasilitasi penguatan pelayanan kesehatan primer	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Kab/Kota terfasilitasi penguatan perkesmas dalam Intervensi Indikator PISPK dan SPM	Kab/Kota			27		27		27		
				Kab/Kota terfasilitasi Peningkatan Program Klinik Tingkat Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota			27		27		27		
				Kab/Kota terpantau pelaksanaan arus mudik dan arus balik	Kab/Kota			27		27		27		
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi layad rawat provinsi	Dokumen	1	12.838.570.340	1	14.472.744.000	1	14.472.744.000	1	14.472.744.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				2.) Dokumen laporan Call Center 119 Layad Rawat Provinsi dan Kab/Kota.	Dokumen	1		1		1		1		
				3.) Dokumen laporan Tenaga Pendamping Program	Dokumen	1		27		27		27		
				Jumlah Kab/Kota terfasilitasi pertemuan evaluasi layad rawat provinsi Jawa Barat	Kab/Kota									
				Jumlah Kab/Kota terfasilitasi workshop petugas Call Center Layad Rawat	Kab/Kota			27		27		27		
				Jumlah Dokumen laporan mobil layad rawat	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kab/Kota terfasilitasi Monitoring evaluasi dan pembinaan kewaspadaan umum pada pelayanan PSC 119	Kab/Kota			27		27		27		
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1) Dokumen Hibah PMI	Dokumen	1	6.566.129.730		604.353.500		196.520.000		196.520.000	
				Jumlah Dokumen Advokasi kepada 27 Kab/kota , LP dan LS untuk menyedia SDM dan Sarana rawat inap dan rawat jalan di RSU Rujukan Regional ;	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi RS Rujukan Regional;	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penguatan pendampingan RS Rujukan Regional;	Dokumen			1		1		1		
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kajian kebutuhan faskes tingkat pertama dan rujukan di kabupaten/kota dan kawasan metropolitan Jawa Barat	Dokumen			1	1.028.877.660	1	274.297.600	1	274.297.600	
				Kajian pembangunan rumah sakit rujukan pusat infeksi provinsi	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Survey Kepuasan Masyarakat	Kegiatan	1	61.380.000	2	77.500.000		100.000.000		100.000.000	**RS JIWA**
				terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	Kali					2		2		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	**LABKES**
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Brosur	Lembar	350	611.619.952	-	300.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	**RS JIWA**
				2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Roll Banner	Pcs	10		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Kalender Duduk	Eksemplar	100		-						
				4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Kalender Dinding	Eksemplar	160		-						
				5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Spanduk	Meter	416		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				6. Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame/Film Pemotretan Advertorial/ Iklan di Smart Digital Platform / Social Media untuk Publikasi Kehumasan Spesifikasi : Advertorial/ Iklan di Smart Digital Platform / Social Media 2	Paket	3		4						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7. Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Publikasi Media Luar Ruang Spesifikasi : Produksi iklan layanan masyarakat	Paket	3		-						
				8. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi - Aplikasi Kesehatan Jiwa Online	Aplikasi	1		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame/Film Pemotretan Advertorial/ Iklan di Smart Digital Platform / Social Media untuk Publikasi Kehumasan, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, pemeliharaan aplikasi KJOL, produuksi iklan, belanja sewa peralatan pameran	Kali					4		4		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan Promosi Rumah Sakit	Bulan	12	50.000.000	12	130.000.000	12	143.000.000	12	143.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah cetakan	Jenis			3	570.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah talkshow	Tahun			1		1		1		
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Makanan Minuman Piket Jaga dan Beresiko	Bulan	12	19.308.474.926	12	16.500.000.000	12	18.000.000.000	12	18.000.000.000	**RSKK**
				Pemeliharaan Kaca dan Dinding Gedung Kantor	Kali/Tahun	1		-						
				Pemenuhan Bahan Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap	Porsi	18980		18980		18980		18980		
				Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum Bulan Ramadhan	Orang	240		240		240		240		
				Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum Idul Fitri	Orang	210		210		210		210		
				Penyediaan Alat Penunjang Penanganan Covid-19	Jenis/Kali	9		9		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis			-		9		9		
				Penyediaan Bahan Habis Pakai Untuk Covid-19	Jenis	46		46		46		46		
				Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Lainnya	Jenis	600		600		600		600		
				Penyediaan Isi Gas Elpiji 12 kg				-						
				Penyediaan Isi Gas Oksigen Tabung Besar				-						
				Penyediaan Isi Gas Oksigen Tabung Kecil				-						
				Penyediaan Obat	Jenis	600		600		600		600		
				Penyediaan Pelayanan Pasien Gakin	Orang	1625		-		-		-		
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	-	-	-	-	-	-	**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	-	-	-	-	-	-	**RS PARU**
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	meningkatnya pelayanan rs	tahun	1	52.750.000	-	-					**RS JIWA**
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR)) < 45/1000	Persen	100	628.530.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	**RS PARU**
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Buku Profil Kesehatan	Buku		**800.000.000**	1			**1.165.000.000**		**1.165.000.000**	
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Profil Kesehatan;	Dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	
				2) Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1				1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3) Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi;	Dokumen	1		1		1		1		
				4) Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan SIK Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1		1		1		1		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	245.000.000	1	245.000.000	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Penyediaan Routerboard	Aplikasi	1	614.511.900	-	955.000.000		**1.100.000.000**		**1.100.000.000**	**RSKK**
				Penyediaan Server / Storage	Unit	1		-						
				Penyeiaan AP Controller	Kegiatan	1		-						
				NMS Server	Unit			1		1		1		
				Pengembangan Modul SIMRS GOS	Kegiatan			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Penyediaan Alat Monitoring Informasi	Unit			6		6		6		
				Penyediaan Aplikasi Laboratorium Information System	Aplikasi			1		1		1		
				Penyediaan Server dan Software Firewall	Unit			1		1		1		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	SIM RS	Paket	1	457.629.010	-	-					**RS JIWA**
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Hardware	Paket	1	233.514.229	-	477.993.815		2.000.000.000		2.000.000.000	**RS JIWA**
				Jumlah aplikasi SIM RS (software) dan kebutuhan alat (hardware) SIM RS	Modul			9		9		9		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab/Kota		**2.539.560.560**	27			**1.798.782.300**		**1.798.782.300**	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaaan Fasilitas Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	234.790.910		234.790.910		196.285.910		196.285.910	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Rumah Sakit yang Difasilitasi dan Dilakukan Pembinaan	Rumah Sakit					70		70		
				Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Perizinan Rumah Sakit	Dokumen			1						
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1) Jumlah Dokumen Pertemuan Penguatan Kesehatan Rujukan Wilayah;	Dokumen	1	1.046.688.710		1.895.646.500		431.373.450		431.373.450	
				2) Dokumen BPRS Provinsi Jawa Barat.	Dokumen	1								
				Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan BPRS Provinsi Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Monev SPM RS	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Pendampingan Pemenuhan Standar RS	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Penguatan Kesehatan Rujukan Wilayah	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Dokumen Pertemuan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen			1		1		1		
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat (NDR) < 25/1000	Persen	100	12.519.782.000	-						**RS PARU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1) Jumlah Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat mempersiapkan re-akreditasi puskesmas;	Kabupaten/Kota	27	1.258.080.940				1.171.122.940		1.171.122.940	
				2) Jumlah Tim Pendamping Akreditasi FKTP Mengikuti Workshop Keselamatan Pasien	Kabupaten/Kota	27								
				3) Jumlah Peserta Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota dan LP/LS Provinsi mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kabupaten/Kota	27								
				4) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP, Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS;	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				5) Jumlah pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan pasca survei akreditasi										
				Jumlah laporan hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Akreditasi dan Pasca Akreditasi FKTP, RS dan Sarana Kesehatan Lain serta Koordinasi LP/LS dalam upaya Pemantauan Mutu Pelayanan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19	Dokumen			1		1		1		
				Kabid Yankes/ Ka Sie Mutu dan Perwakilan RS mengikuti Workshop Pembinaan dan Monev kesiapan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19	Kab/Kota			27		27		27		
				Kabid Yankes mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Kabid Yankes mengikuti Sosialisasi Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien Fasilitas Kesehatan Lain di Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota			27		27		27		
				Tim Mutu RS mengikuti Workshop Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Ed 1.1 Bagi Rumah Sakit Di Jabar	Kab/Kota			27		27		27		
				Tim Pendamping mengikuti Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior Jawa Barat	Kab/Kota			27		27		27		
				Tim Pendamping mengikuti Sosialisasi pedoman Teknis PPI di Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Tim Pendamping mengikuti Workshop Standar Akreditasi Klinik Pratama Bagi Tim Pendamping Akreditasi Klinik Pratama	Kab/Kota			27		27		27		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Peningkatan kinerja Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Dokumen /Bulan	1	280.000.000	12	700.000.000	12	770.000.000	12	770.000.000	**LABKES**
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Bimbingan Teknis Akreditasi RS	Kegiatan	5	322.800.000	-	200.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	**RS JIWA**
				2. Survey Akreditasi RS	Kegiatan	1		-						
				3. Workshop Akreditasi RS	Keg	1		-						
				Terselenggaranya Survey Akreditasi RS dan Akreditasi pendidikan	Sertifikat			2						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tingkat Capaian Akreditasi Rumah Sakit	Dokumen Paripurna	1	4.043.198.093	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	**RS PARU**
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	Persen		**128.789.629.563**	59			**89.100.000.000**		**89.100.000.000**	
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota		**127.795.636.250**	27			**85.800.000.000**		**85.800.000.000**	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan;	Orang	876	127.795.636.250				85.800.000.000		85.800.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				2. Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja ;	Orang	876								
				3. Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar didayagunakan di lokasi bermasalah kesehatan;	Orang	220								
				4. Evaluasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar	Orang	54								
				5. Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar;	Orang	54								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				6. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar di Kab/ Kota;	Kabupaten/Kota	27								
				7. Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan;	Orang	85								
				9. Pengelolaan Tenaga Adminstrasi;	Orang	5								
				10. Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Kedaruratan Covid-19	UnitKerja	8								
				11. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan SDMK Covid-19	Kabupaten/Kota	6								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				12. Tenaga Relawan Tim Pelaksana Puskesmas	Orang	300								
				Honorarium Tenaga Kesehatan Non PNS Jawa Barat yang di tempatkan di Kabupaten/Kota	Orang					854		854		
				Honorarium Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Orang					220		220		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Honorarium Tenaga Medis Spesialis	Bulan	13	17.919.900.000	-	28.979.100.000		22.000.000.000		22.000.000.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Honorarium Tenaga Medis Umum	Bulan	13		-						
				Honorarium Tenaga Paramedis dan Penunjang Medis	Bulan	13		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19	Tahun			12		1		1		
				Jumlah tenaga Non PNS medis paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	Bulan			13		13		13		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Administrasi Pelayanan	Orang	10	13.706.976.160	-	33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000	**RSKK**
				Apoteker	Orang	4		-						
				Asisten Apoteker	Orang	10		-						
				Bidan	Orang	12		-						
				CSSD	Orang	6		-						
				Dokter Spesialis	Orang	14		-						
				Dokter Umum	Orang	10		-						
				Epidemiolog	Orang	1		-						
				Front Office	Orang	12		-						
				Instalasi Gizi	Orang	11		-						
				IPSRS	Orang	10		-						
				IT	Orang	5		-						
				Kesehatan Lingkungan	Orang	2		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pemulasaraan Jenazah dan Ambulans	Orang	12		-						
				Pencatatan dan Pelaporan Keuangan	Orang	4		-						
				Perawat Ahli	Orang	34		-						
				Perawat Pelaksana	Orang	38		-						
				Petugas Laundry	Orang	6		-						
				Pranata Labkes	Orang	12		-						
				Radiografer	Orang	7		-						
				Rekam Medis	Orang	12		-						
				Jumlah Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19	Bulan	-		12		12		12		
				Jumlah Tenaga Medis	Orang	-		150		150		150		
				Jumlah Tenaga Non Medis	Orang	-		75		75		75		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga Non PNS medis paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	Orang	450	22.668.500.000	490	35.000.000.000	490	27.500.000.000	490	27.500.000.000	**RSUD JAMPANG**
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga non PNS medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	Bulan			12	12.843.759.411	12	5.500.000.000	12	5.500.000.000	**RS JIWA**
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga Non PNS medis paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	Bulan			12	26.452.241.500	12	23.330.760.200	12	23.330.760.200	**RS PARU**
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah insentif tenaga medis penanggulangan Covid-19	Bulan			12	36.000.000.000	12	36.000.000.000	12	36.000.000.000	**AL IHSAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Honorarium Tenaga Kesehatan Non PNS Jawa Barat yang di tempatkan di Kabupaten/Kota	Orang			845	96.117.202.504					
				Honorarium Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Orang			220						
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				**993.993.313**				3.300.000.000		3.300.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1) Pengelolaan Registrasi, Sertifikasi Tenaga Kesehatan;	Orang	54	993.993.313		3.000.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan;	Orang	243								
				3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi;	Orang	27								
				4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat;	Orang	5								
				5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat penghargaan;	Orang	9								
				6) Tersusunnya analisis kebutuhan diklat	Dokumen	1								
				7) Koordinasi pembinaan dan pengawasan mutu SDMMK	Orang	54								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Pembinaan JFK	JFK			7		7		7		
				Pengelolaan Sertifikasi dan Registrasi Nakes	Jenis Nakes			9		9		9		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Dokumen			1		1		1		
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Keagamaan (Honorarium Penceramah/Da	Orang/Kegiatan	4	2.586.950.000	9	242.540.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	**RS JIWA**
				Terlaksananya Kegiatan Kerohanian (Jasa Khatib, Penceramah Agama, Guru Ngaji) di RS Jiwa	Orang/Kegiatan	311		-		-		-		
				Terlaksananya Kegiatan Olahraga (Sewa Lapang Bulutangkis)	Bulan	11		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terlaksananya Kegiatan Olahraga (Sewa Lapang Futsal)	Bulan	11		-		-		-		
				Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Anak di RS Jiwa	Bulan	13		-		-		-		
				Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Anastesi di RS Jiwa	Bulan	13		-		-		-		
				Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Patologi Klinik di RS Jiwa	Bulan	13		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RS Jiwa	Bulan	13		-		-		-		
				Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik di RS Jiwa	Bulan	13		-		-		-		
				Terselenggaranya Medical Checkup Pegawai RS Jiwa	Orang/Kegiatan	383		-		-		-		
				Jumlah Fasilitasi Peringatan kegiatan hari besar keagamaan	Kegiatan	-		-		9		9		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Orang			36	200.000.000	36	220.000.000	36	220.000.000	**LABKES**
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	01. Nilai Akreditasi Institusi	Nilai	3.5	2.129.614.643				2.367.950.267		2.367.950.267	**uplekes**
				02. Persentase Pelatihan Yang Terakreditasi Dalam Satu Tahun	Persen	100								
				03. Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan	Kegiatan	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				04. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Progam Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	60								
				05. Jumlah Kurikulum yang di susun dan di review	Kurikulum	2								
				06. Jumlah Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan - Pengelola Mutu	Orang	1								
				07. Jumlah Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan - Pengembang Teknologi Pembelajaran	Orang	1								
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Laboratorium Lapangan	Lokasi			4		4		4		
				Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan	Kegiatan			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kab/Kota	Kegiatan			1		1		1		
				Jumlah Kurikulum Pelatihan yang disusun dan direview	Kurikulum			3		3		3		
				Jumlah Modul Pelatihan yang disusun	Modul			3		3		3		
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Akupresur Untuk Kesehatan Ibu dan Anak	Orang			60		60		60		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Asuhan Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan TOGA Untuk Kesehatan Ibu dan Anak	Orang			60		60		60		
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Hipnoterapi Bagi Kesehatan Ibu dan Anak	Orang			60		60		60		
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Imunisasi Bagi Pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang			90		90		90		
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita	Orang			90		90		90		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan TB di FKTP	Orang			90		90		90		
				Jumlah Video Pembelajaran Pelatihan yang dibuat	Video			5		5		5		
				Nilai Akreditasi Institusi	Nilai			3,7		3,7		3,7		
				Persentase Pelatihan Yang Terakreditasi Dalam Satu Tahun	Persen			100		100		100		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kompetensi Pegawai Yang Terlatih	Orang	25	100.000.000	-	263.000.000		289.300.000		289.300.000	**RS PAMEUNGPEUK**
				Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang			53		53		53		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan Melalui In House Training	Kegiatan	7	2.000.000.000	7	800.000.000	7	880.000.000	7	880.000.000	**RSKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan Melalui Pelatihan Eksternal	Kegiatan	20		20		20		20		
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	120	99.000.000	120	100.000.000	120	350.000.000	120	350.000.000	**RSUD JAMPANG**
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan	Persen	60	1.086.260.000	-	617.960.000		2.000.000.000		2.000.000.000	**RS JIWA**
				2. Fasilitasi Diklat	Persen	100		-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan, audit klinis PPA Perawat, terlaksananya assessment kompetensi,	Persen			60						
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang. sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Seksi Farmasi Kosalkes Mamin	Persen		**843.431.029**	88			**600.000.000**		**600.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Dokumen		**605.099.803**	1			**400.000.000**		**400.000.000**	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1) Jumlah Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan PBF Cabang yang di Monitoring	Sarana	30	605.099.803		350.000.000		400.000.000		400.000.000	
				2) Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang di Monitoring	Sarana	55								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3) Jumlah Pelaku Usaha Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang telah Tersosialisi terkait Perizinan Terintegrasi Secara Elekronik	Orang	45								
				4) Jumlah Dokumen Rapat Kordinas Terkait Penerbitan Izin Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Pedaganag Besar Farmasi (PBF) Cabang	Dokumen	1								
				Jumlah Dokumen Hasil Konsolidasi terkait Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan DPMPTSP	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Pelaku Usaha Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi Cabang yang Tersosialisasi terkait Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	Sarana			40		40		40		
				Jumlah Pelaku Usaha Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang telah Tersosialisasi terkait Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	Sarana			50		50		50		
				Jumlah Sarana Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi Cabang yang dilakukan Pemeriksaan	Sarana			35		35		35		
				Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang telah dilakukan Pemeriksaan	Sarana			60		60		60		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Dokumen		**238.331.226**	1			**200.000.000**		**200.000.000**	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1) Jumlah Dokumen Hasil Rapat Kordinasi Terkait Sertifikat Ijin Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Sarana	20	238.331.226		477.500.000		200.000.000		200.000.000	
				2) Jumlah Pelau Usaha yang telah tersosialisasi Terkait Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik untuk Pelaku Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Orang	25								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi terkait Sertifikat Ijin Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah Pelaku Usaha yang telah tersosialisasi Terkait Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik untuk Pelaku Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Orang			25		25		25		
				Jumlah Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan Pembinaan dan Pemeriksaan	Sarana			21		21		21		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen		**3.251.648.000**	88,9			**4.040.055.528**		**4.040.055.528**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	Kab/Kota		**650.000.000**				**1.564.025.264**		**1.564.025.264**	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1) Jumlah kab/ kota mengikuti evaluasi pengelolaan perubahan perilaku pencegahan Covid-19	Kabupaten/Kota	27	650.000.000		650.000.000		1.564.025.264		1.564.025.264	
				2) Jumlah dokumen kesepakatan peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan dan Lintas Sektor	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				3) Jumlah kab/kota melaksanakan penguatan desa siaga covid-10	Kabupaten/Kota	27								
				4) Jumlah dokumen komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19	Dokumen	1								
				5) Jumlah kab/kota melaksanakan Penguatan komitmen edukasi kesehatan mitra potensial pencegahan Covid-19 (SBH/ forum kesehatan/organisasi profesi/ organisasi keagamaan/ karang taruna/ swasta)	Kabupaten/Kota	27								
				6) Jumlah dokumen kesepakatan koordinasi Teknis Perencanaan dan Evaluasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7) Jumlah laporan Rapat evaluasi internal pengelolaan data perubahan perilaku pencegahan Covid-19	Laporan	24								
				Evaluasi Kegiatan Saka Bakti Husada (SBH) dengan Kabupaten Kota se Jawa Barat	Dokumen			1		1		1		
				Jumlah perencanaan dan evaluasi kegiatan Advokasi dan KIE 27 Kabupaten/Kota	Dokumen			2		2		2		
				Pengiriman Kontingen PERTINAS SBH Provinsi Jawa Barat	Kontingen			1		1		1		
				Penguatan desa/Kelurahan Siaga Aktif bagi 27 Kabupaten/Kota	Dokumen			1		1		1		
				Penguatan Mitra Kerja Promkes (SBH/Blogger/Youtuber)	Dokumen			1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan dan Lintas Sektor bagi 27 Kabupaten/Kota	Kontingen			1		1		1		
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1. Plakat	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	**RS JIWA**
				2. Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang pasien	Kegiatan	1		-		-		-		
				3. iklan di media cetak dan elektronik	Kegiatan	1		-		-		-		
				4. Banner	Kegiatan	1		-		-		-		
				5. Spanduk	Kegiatan	1		-		-		-		
				6. Poster/informasi edukasi	Kegiatan	1		-		-		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				7. Keg, Leaflet /Brosur	Kegiatan	1		-		-		-		
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kerja Sama (MOU) dengan Institusi Kesehatan dalam Penanganan Penyakit TB Paru	Dinkes	5	330.025.000	5	100.000.000		150.000.000		150.000.000	**RS PARU**
				Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring ekternal TB melalui kegiatan Layad Paru	Kab/Kota					5		5		
				Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas										

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	Kab/Kota		**2.601.648.000**				**2.476.030.264**		**2.476.030.264**	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10) Jumlah media Penyebarluasan informasi/KIE Vaksinasi Imunisasi Covid 19	Media	6	2.601.648.000				2.476.030.264		2.476.030.264	
				11) Jumlah Laporan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Imunisasi Covid 19	Dokumen	1								
				12) Jumlah Audensi/Advokasi pelaksanaan Imunisasi Covid 19	Dokumen	1								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				13) Jumlah unsur yang mengikuti sosialisasi vaksinasi imunisasi Covid 19	unsur	6								
				14) Jumlah Puskesmas yang mengikuti Loka karya lintas sektor Kecamatan untuk penguatan Surveilans Berbasis Masyarakat dan Promosi Pencegahan Penularan Covod-19 (CISDI)	puskesmas	100								
				15) Jumlah Media Edukasi (CISDI)	media	100								
				1) Jumlah kabupaten kota yang mengikuti Pertemuan Pembinaan PHBS Rumah Tangga;	Kabupaten/Kota	27								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				2) Jumlah rumah sakit yang mengikuti Pertemuan Komunikasi risiko perubahan perilaku di RS dalam pencegahan covid-19	Kabupaten/Kota	27								
				3) Jumlah kab/ kota yang mengikuti pertemuan pembuatan media KIE PHBS & Germas;	Kabupaten/Kota	27								
				4) Jumlah kabupaten kota yg mengikuti penyusunan rancangan komunikasi perubahan perilaku di tatanan sekolah;	KabupatenKota	27								
				5) Jumlah kabupaten kota yang mengikuti sosialisasi Pedoman Pembinaan KIE PHBS dan Germas;	KabupatenKota	27								

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				6) Jumlah Laporan rapat penyusunan instrumen evaluasi pembinaan KIE PHBS dan Germas;	Dokumen	1								
				7) Jumlah laporan rapat penyusunan Pedoman Pembinaan KIE PHBS dan Germas;	Dokumen	1								
				8) Jumlah media kegiatan kampanye melalui ILM kesehatan di Media;	Media	6								
				9) Jumlah laporan kegiatan penguatan penggerakan masyarakat.	Dokumen	1								
				Jumlah Kabupaten Kota Yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Germas	Kab/Kota			27		27		27		
				Jumlah kabupaten kota yang mengikuti Pertemuan Pembinaan PHBS Rumah Tangga	Kab/Kota			27		27		27		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Kabupaten kota yang mengikuti Pertemuan Penyusunan Rancangan Komuniksi Perubahan Perilaku Di Tatanan Sekolah	Kab/Kota			27		27		27		
				Jumlah Kabupaten Kota Yang Mengikuti Pertemuan Promosi Kesehatan Di Wilayah Perbatasan	Kab/Kota			8		8		8		
				Jumlah Media Yang Digunakan Untuk Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Media			8		8		8		
				Jumlah Mitra Kesehatan Yang Dapat Dibina	Mitra			3		3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**
				Jumlah Petugas Promkes Yang Mengikuti Workshop Optimalisasi Strategi Promotif Preventif	Orang			243		243		243		
				Jumlah Poskestren Yang Dibentuk	Pesantren			2		2		2		
				Jumlah Rumah Sakit Yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan PKRS	Rumah Sakit			185		185		185		
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Pasien	5200	200.000.000	-	-	-	-	-	-	**RS PARU**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan ASN Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang dan UPTD yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian dan program/kegiatan kabupaten/kota. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 yang berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 196212031988032001